

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



EDISI I /MARET 2025

KHUSUS

Susun RUU Hilirisasi Minerba
Komite II Serap Aspirasi Daerah

15

NUSANTARA

Pabrik Pengolahan
Singkong Harus
Berpihak Pada Petani

23

MASALAH DIKDASMEN MAKIN KOMPLEKS



VARIA SENAT

Kasus Pagar Laut
Komite I Minta Penjelasan Menteri ATR

41

SETJEN

Lalu Niqman Zahir Berikan
Tips Petani Jadi Pengusaha

53



Menyelesaikan Simpul Kusut Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang kompleks dan berlapis. Mulai dari kesenjangan akses, kesejahteraan tenaga pengajar, hingga masalah manajemen pendidikan yang belum sepenuhnya transparan. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengungkapkan bahwa kesenjangan akses terhadap pendidikan semakin diperparah oleh kurangnya infrastruktur, tenaga pengajar, serta fasilitas yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih membutuhkan reformasi menyeluruh agar dapat berjalan lebih inklusif dan adil.

Salah satu permasalahan utama yang terus mencuat adalah ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN dan guru honorer. Ribuan guru honorer masih menunggu kepastian status mereka dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun pemerintah telah membuka ratusan ribu formasi PPPK, masih ada ratusan ribu lainnya yang belum mendapatkan kepastian. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan individu para guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Guru yang tidak sejahtera, sulit untuk memberikan pengajaran yang maksimal bagi siswa, dan hal ini menciptakan ketimpangan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.

Di sisi lain, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahun selalu menimbulkan po-

lemik. Banyak orang tua merasa sistem ini tidak adil, dengan berbagai kecurangan yang terjadi. Meskipun sistem zonasi telah diterapkan untuk mengurangi ketimpangan, implementasinya masih jauh dari ideal. Masalah administratif, manipulasi domisili, serta kurangnya transparansi dalam seleksi menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap anak justru sering kali menjadi ajang persaingan yang tidak sehat akibat ketidaksempurnaan regulasi yang ada.

Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada kebijakan-kebijakan baru dalam dunia pendidikan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus keracunan makanan di sebuah sekolah dasar di Sukoharjo menjadi bukti bahwa program yang bertujuan baik bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Kualitas makanan, distribusi yang tepat, serta kepastian pemenuhan kebutuhan gizi anak harus benar-benar diawasi secara ketat. Kebijakan yang baik harus didukung oleh pengawasan yang kuat agar tidak menjadi sekadar proyek formalitas tanpa manfaat nyata bagi siswa.

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi lebih erat dalam menangani berbagai permasalahan pendidikan ini. Reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pengajaran, kesejahteraan guru, serta transparansi dalam manajemen pendidikan harus menjadi prioritas utama. Sistem pendidikan yang adil dan berkualitas hanya dapat terwujud jika ada komitmen kuat dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pengawas kebijakan yang diterapkan. (* / Arso P Nugroho)

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma
PEMIMPIN REDAKSI: Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah_senator@dprd.go.id // website : www.dprd.go.id // IG : @dprdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dprdri



Unravelling the Tangled Thread of Primary and Secondary Education

Primary and secondary education in Indonesia is still facing major complex multi-layer challenge, ranging from access gap, educators' welfares, to untransparent academic management. In work meeting with the Minister of Primary and Secondary Education, The Chairman of Committee III DPD RI, Filep Wamafma, utters that access gap toward education is worsened by lack of infrastructure, educators, and sufficient facilities. It indicates that Indonesian education is still in need for thorough reformation in order to be more inclusive and just.

One of the recurring primary issues is the gap between civil-servant teachers and honorarium teachers. Thousands of honorarium teachers are still waiting for their employment status certainty within the scheme of the civil servant under work agreements (PPPK). Despite the government issuing hundreds of thousands of PPPK forms, there are still hundreds of thousands who have not received clarity. Not only does the situation affect the individual welfare of the teachers, but it does also the overall quality of the education. Less prosperous teachers struggle to deliver maximum quality teaching to students, and the issue creates an educational quality gap in various regions.

On the other hand, the new student admission process (PPDB) every year always leads to polemics. Many parents perceive the system is unfair with various existing frauds. Despite the

implementation of zoning system to reduce the gap, the implementation is still far from being ideal. Administrative issues, domicile manipulations, and lack of selection transparency have upset the society. Education, which is supposed to be basic right of a child, has often turned into unfair competition due to the existing imperfect regulation.

Besides, attention has to be given to new policies related to the academic world, including Free Nutritious Food Program (MBG). Food poisoning case at a primary school in Sukoharjo is evidence that a supposedly well-intended program can possibly backfire if it is not properly managed. Food quality, appropriate distribution, and children's nutrient fulfillment certainty must be closely monitored. Proper policy must be supported by firm monitoring in order not to let it become another formal project without real benefit to students.

The central government and regional administrations must synergize more closely in handling this manifold academic issues. Policy reformation which is leaning more toward improvement of teaching quality, teachers' welfare, and transparency in academic management must be a top priority. A fair and qualified education system can only be realized if there is a strong commitment by all parties, including the community as the witness toward the implementation of the policy.

(*Arso P Nugroho)

SENATOR
MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ADVISOR BOARD: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **NEWS IN CHARGE:** Mahyu Darma **EDITOR-IN-CHIEF:** Heru Firdan; **MANAGING EDITOR:** Budi Fitra Helmi; **PHOTO & GRAPHICS EDITOR:** Agus Wiharto; **SENIOR EDITORS:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **ARTICLE WRITER:** Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah.

EDITORIAL OFFICE News and Media Division, 1st Floor, Building B, DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6, Central Jakarta 10270.
Email: keranjangsenator@gmail.com Suggestions Box: majalah_senator@dpd.go.id // website: www.dpd.go.id // IG: @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

MASALAH DIKDASMEN MAKIN KOMPLEKS

Masalah pendidikan di Indonesia, khususnya pada tingkat dasar dan menengah, masih merupakan sebuah jaringan masalah kompleks yang menyeruak dari berbagai sisi.

Theresia Oktavina

Penulis

Dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Senin (3/2/25), Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, mengungkapkan pandangannya tentang berbagai aspek yang saling terkait ini. Menurutnya, kesenjangan akses adalah salah satu hal yang paling menonjol, diperburuk oleh kekurangan infrastruktur, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan.

Senator dari Papua Barat ini juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan antara guru aparatur sipil negara (ASN) dan guru honorer. "Di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, perbedaan ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam kualitas pengajaran. Standardisasi kompetensi mengajar yang belum memadai semakin menambah rumit situasi yang ada," ujar Filep.



Ketua Komite III DPD RI Filep Mawafma didampingi para Wakil Ketua Komite III saat memimpin rapat kerja dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Permasalahan terbaru yang mencuat di arena pendidikan adalah pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pada tahun 2024, sebanyak 300 ribu formasi PPPK dibuka, namun masih terdapat sekitar 400 ribu guru honorer yang menanti kejelasan status. Situasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi tenaga pengajar di Indonesia.

Selanjutnya, setiap tahun di awal tahun ajaran baru, masalah penerimaan peserta didik baru selalu muncul dan menjadi sumber keresahan di kalangan orang tua. Proses ini sering kali diwarnai oleh kecurangan dan ketidakadilan, memperlihatkan betapa sistematisnya tantangan yang dihadapi dalam manajemen pendidikan di negara ini.

Kasus terbaru adalah insiden

keracunan makanan yang dialami oleh siswa di sebuah sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keluhan serupa datang dari berbagai daerah lain mengenai kualitas makanan dalam program ini, yang tidak sesuai dengan preferensi anak-anak, serta kekecewaan karena tidak mendapatkan susu yang dijanjikan.

Menghadapi berbagai tantangan ini, Filep Wamafma mengharapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dinas pendidikan di tiap provinsi dan kabupaten/kota untuk berperan aktif. Kerjasama dan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi kunci dalam menangani dan memecahkan masalah-masalah pendidikan yang ada, demi mencapai sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas di Indonesia. (*)

MENYEDIHKAN, Anggaran Kemendikdasmen Hanya Rp33,5 Triliun Saja



Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Arso P Nugroho

Penulis

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Zuhri M Syazali, mengatakan bahwa alat kelengkapan DPD RI yang membidangi pendidikan harus memberikan perhatian khusus berkaitan dengan minimnya anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dari total Rp724,2 triliun anggaran pendidikan, Kemendikdasmen hanya mendapat alokasi sekitar Rp33,5 triliun atau sekitar 4,63 persen saja. Padahal, program yang direncanakan sangat luar biasa. Anggaran pendidikan terbesar justru banyak tersebar di kementerian/lembaga lainnya, yakni sebesar Rp104,5 triliun atau 14,42 persen.

“Menyedihkan itu. Komite

III DPD RI harus memberi perhatian khusus dan mengupayakan adanya peningkatan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikdasmen,” kata Senator dari Bangka Belitung itu dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, di Gedung DPD RI, Senin (3/2/2025).

Sedangkan Senator dari Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, mengharapkan daerah pemilihannya mendapat prioritas untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2025 yang akan dialokasikan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang terkena dampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Sedikitnya ada 29 SMA/SMK yang rusak akibat bencana.

Senator dari Bali, Ida Bagus Rai, mengusulkan Kemendikdasmen membuat perjanjian kerja sama atau MOU dengan Polri,

untuk mencegah sekaligus mengefektifkan dan menindaklanjuti temuan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) maupun Satgas Perlindungan Guru di satuan pendidikan dari berbagai tindakan kriminalisasi, dan sebagai tindak lanjut dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Sedangkan Senator dari Maluku Utara, Hasby, mengkritisi masih adanya pungutan yang dilakukan atas nama mendukung kegiatan belajar di sekolah, misalnya kegiatan *study tour*. Menurut Hasby, *study tour* dibutuhkan siswa untuk mendukung kegiatan belajar di kelas. Kegiatan ini banyak tidak bisa dilakukan karena anggaran terbatas dari sekolah dan larangan sekolah melakukan pungutan. Akhirnya pengumpulan biaya dilakukan oleh Komite Sekolah. Harus adanya aturan yang jelas terkait peran Komite Sekolah. (*)

Dampak Pengangkatan PPPK, Sekolah Swasta Kurang Guru



Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti usai menggelar rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Masalah seleksi guru non aparatur sipil negara (ASN) atau honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Rapat Kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Berdasarkan catatan yang disampaikan Komite III DPD RI dalam rapat kerja tersebut, jumlah guru honorer di Indonesia yaitu 700 ribuan. Di mana terdapat rekrutmen pada tahun 2024 sebanyak 300 ribuan formasi PPPK, sehingga masih tersisa sekitar 400 ribuan guru honorer

yang belum diangkat menjadi PPPK.

Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tersebut, juga berdampak terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta. Mereka yang selama ini mengajar di sekolah swasta dan kemudian diangkat menjadi PPPK diwajibkan mengajar di sekolah negeri. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yang mengakibatkan sekolah-sekolah swasta kekurangan guru setelah diangkat menjadi PPPK.

“Kita telah menerima aspirasi masyarakat bahwa kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta, karena guru yang diangkat PPPK sekarang pindah mengajar di sekolah negeri. Maka ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa mengatasinya,” kata Anggota DPD RI Provinsi asal Papua Barat

Daya, Hartono.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan BAHWA pihaknya saat ini sangat konsen terhadap guru-guru honorer yang diangkat PPPK. Rekrutmen guru PPPK dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan terus berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia.

Bagi guru honorer yang tidak diangkat menjadi PPPK, Abdul Mu'ti menegaskan pemerintah tetap memberikan perhatian kepada mereka. Mereka tetap diberikan tunjangan profesi dan insentif. “Ke depan, kami juga mengupayakan kebijakan untuk melakukan pembayaran gaji atau tunjangan guru honorer dengan transfer langsung ke rekening yang bersangkutan,” ujar Mu'ti. (*)

Masalah Guru Swasta Harus Segera Dituntaskan

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menegaskan pentingnya penyelesaian masalah guru swasta secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurutnya, persoalan guru swasta yang terus berulang dari rezim ke rezim harus segera ditangani secara serius, mulai dari hulu hingga hilir.

“Ini tidak boleh terus berulang. Kita harus serius menangani ini. Jangan hanya *hit and run*, lapor sana-sini, tapi tidak ada solusi nyata. Ayo kita bangun mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Penrad Siagian ketika Komite I DPD RI menerima audiensi Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) Provinsi Jawa Tengah, Senin (10/2/2025).

Ia menilai langkah-langkah parsial dan tidak terstruktur selama ini hanya memperpanjang daftar masalah tanpa memberikan solusi konkret. Harus digali apa persoalannya sehingga tidak berulang. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memanggil Menteri PANRB untuk ber-cakap-cakap, basa-basi, berfoto, dan kemudian diang-



Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI menerima audiensi Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) Provinsi Jawa Tengah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

gap selesai. “Sementara guru swasta tetap dalam kondisi yang sama. Mereka tetap saja begini. Kalau begini-begini terus pekerjaan kita di ruangan ini, saya juga bosan dan tentu akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” kata Penrad dengan nada tinggi.

Penrad menekankan pentingnya pendataan masalah guru swasta secara menyeluruh, termasuk masalah regulasi yang dinilai merugikan. Harus didata semua persoalan guru ini, baik swasta maupun negeri. Lalu, dikaji ulang regulasi yang ada. Karena banyak peraturan menteri yang kontroversial dan bersifat parsial. Padahal, undang-undang harus berlaku untuk semua, tidak boleh diskriminatif.

Ia juga mendorong pembentukan kelompok kerja

(pokja) khusus untuk menangani masalah ini. Perlu skema dan sistem yang jelas agar masalah ini bisa diselesaikan tuntas, tidak berulang terus. Jangan sampai hanya bermain *gimmick*, sementara guru-guru swasta tetap menderita. Padahal, kontribusi sekolah swasta dalam pendidikan nasional sangat besar.

“Tanpa sekolah swasta, tidak ada pendidikan di republik ini. Jumlah sekolah swasta di Indonesia hampir 62 persen dari total sekolah. Mereka mendidik lebih dari 75 persen anak bangsa, karena di banyak daerah terpencil atau 3T (Tertinggal, terdepan, terluar), ada kemungkinan sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri. Tetapi, yang banyak terjadi termasuk kasus kita hari ini adalah kenapa justru sekolah swasta yang sering didiskriminasi?” tegasnya. (*)



Wawancara Senator Abraham Liyanto:

Segera Implementasikan PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Adhi Nugroho

Penulis

Pemerintah diminta segera mengimplementasikan kebijakan yang memungkinkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajar di sekolah-sekolah swasta. “November 2024 sudah diumumkan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti, namun hingga kini belum ada juga tanda-tanda akan dilaksanakan,” kata Anggota DPD RI asal Provinsi NTT Abraham Liyanto. Berikut petikan tanya jawabnya yang disarikan dari keterangan Abraham, Sabtu (15/2/2025):

Apa yang mendorong Anda untuk mendesak pemerintah terkait kebijakan PPPK mengajar di sekolah swasta?

Saya mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan yang memungkinkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajar di sekolah-sekolah swasta, karena kebijakan ini telah diumumkan sejak November 2024 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, namun belum tampak tanda-tanda implementasinya di berbagai daerah, termasuk di NTT.

Mengapa kebijakan ini dianggap penting?

Tentu penting karena sangat membantu sekolah-sekolah

swasta yang sedang menghadapi kekurangan guru. Saya mencatat bahwa di NTT, belum ada implementasi dari kebijakan tersebut, meskipun kebijakan ini sudah diumumkan beberapa bulan sebelumnya. Begitu juga di provinsi lainnya, juga belum dilaksanakan.

Apa dampak dari kebijakan ini bagi sekolah swasta, khususnya di NTT?

Sekolah-sekolah swasta di NTT, banyak di antaranya terancam tutup akibat kekurangan guru dan ketidakmampuan mereka untuk membayar gaji guru baru. Selain itu, penurunan jumlah murid di sekolah swasta dipengaruhi oleh ekspansi sekolah negeri ke desa-desa, sehingga semakin menambah beban yang dihadapi oleh sekolah-sekolah tersebut.

Bagaimana semestinya perlakuan terhadap sekolah negeri dan swasta?

Sekolah negeri dan swasta harus diperlakukan sama, karena keduanya memiliki peran yang sama penting dalam pendidikan nasional. Hal ini menjadi poin utama dalam mendukung kebijakan yang memungkinkan PPPK mengajar di sekolah swasta, sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan guru di sektor pendidikan swasta. Di era Orde Baru bisa dilaksanakan, kenapa sekarang tidak? (*)



Anggota DPD RI Abraham Liyanto.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pemerintah Ubah Sistem Penerimaan Murid Baru

Mas Aryo Kritiyanto

Penulis

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)

Abdul Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (3/2/2025), memastikan pihaknya mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai 2025.

SPMB yang akan diberlakukan nantinya, di antaranya untuk jenjang SD, sistem penerimaan masih akan mengikuti mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, untuk tingkat SMP ada perubahan menyangkut persentase masing-masing, yaitu jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Jalur prestasi yang sebelumnya hanya mencakup prestasi akademik dan non-akademik, kini akan diperluas dengan menambahkan jalur prestasi kepemimpinan. Terjadi kenaikan persentase untuk jalur prestasi, baik di tingkat SMP sederajat maupun SMA sederajat. Untuk SMP, jalur prestasi menjadi 25 persen dan 35 persen bagi SMA. Sebelumnya, jalur prestasi bagi SMA diperoleh dari sisa kuota yang ada dari jalur lainnya.



Ketua Komite III DPD RI Filep Mawafma bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Kami ingin supaya lebih berkeadilan dengan cara transparansi dalam penerimaan murid baru itu.”

Mendikdasmen,
Abdul Mu'ti

“Jalur ini untuk menampung anak-anak yang secara aktif melakukan kegiatan kepemimpinan di sekolah seperti OSIS, Pramuka, dan lainnya. Dengan adanya jalur ini, diharapkan siswa yang memiliki pengalaman kepemimpinan dapat diberikan kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan,” kata Mu'ti.

Untuk jalur zonasi atau

domisili, kuotanya dikurangi menjadi maksimal 30 persen. Ini untuk mengatasi anak-anak berprestasi dari keluarga yang belum mampu untuk mendapatkan sekolah negeri. Pada PPDB sebelumnya, jalur prestasi hanya diberikan sisa kuota. Hal ini menjadi masalah sehingga anak-anak berprestasi dari keluarga yang belum mampu merasa tidak ada tempat.

Selama ini dalam PPDB, ditemukan fakta di lapangan bahwa sekolah negeri banyak menerima jalur aspirasi. Kepala sekolah seringkali tidak berani menolak aspirasi tersebut. “Kami ingin supaya lebih berkeadilan dengan cara transparansi dalam penerimaan murid baru itu,” kata Mendikdasmen. (*)



Sekolah Swasta Terakreditasi Dialokasikan Dana Khusus

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

memastikan bahwa tidak semua anak-anak di negeri ini bisa tertampung atau bersekolah di sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diberlakukan pada penerimaan murid baru tahun 2025 ini. Karena itulah diperlukan peran dari sekolah swasta.

“Dalam sistem baru ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana khusus bagi sekolah swasta yang terakreditasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dalam SPMB tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan di sekolah swasta, dengan

dukungan dari pemerintah daerah,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (3/2/2025).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa tidak mungkin hanya mengandalkan sekolah negeri untuk penerimaan murid baru, sehingga diperlukan peran dari sekolah swasta. Pihaknya juga telah memetakan daerah-daerah beserta peserta didik serta menetapkan kuota bagi sekolah swasta dalam SPMB.

Anggota Komite III DPD RI dari Maluku Utara, Hasby Yusuf, mengapresiasi kebijakan Kemendikdasmen terkait penerimaan murid baru, termasuk perubahan zonasi menjadi domisili dan pemerataan antara sekolah negeri dan swasta. “Pak Menteri telah memulai suatu aura positif untuk kebijakan pen-

didikan kita,” ucapnya.

Anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama, juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Kemendikdasmen. Dia mengapresiasi konsep *deep learning*, swakelola dalam rehabilitasi sekolah, dan teknis pelaporan guru. Kebijakan pembatasan jumlah siswa di sekolah negeri dan pemerataan dengan sekolah swasta pun sangat luar biasa.

“Dengan berbagai kebijakan ini, Kemendikdasmen diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik serta tenaga pendidik di Indonesia,” kata senator dari daerah pemilihan Jawa Timur. (*)



Anggota DPD RI Lia Istifhama
(FotoDok Pribadi)



Anggota DPD RI Hasby Yusuf
(Foto Dok Pribadi)

Jangan Terjadi Lagi Kecurangan dalam Penerimaan Murid Baru

Betria Eriani

Penulis

Pemerintah akan mengubah sistem penerimaan murid atau siswa baru pada tahun 2025 ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru itu menggunakan nama PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru. Pada tahun ini, pemerintah menggunakan nama Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Dalam SPMB ini, lebih banyak substansi mengatur kuota penerimaan murid baru untuk SMP dan SMA sederajat.

Terlepas dari sistem penerimaan murid baru itu, anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agita Nurfianti, dalam rapat kerja Komite III dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Senin (3/2/2025), menekankan agar tidak sampai terjadi kecurangan dalam penerimaan murid baru.

Karena itu, senator dari Jawa Barat mempertanyakan jalur domisili dalam SPMB yang akan diterapkan pemerintah dalam penerimaan murid baru pada tahun 2025 ini. "Pada masa lampau, banyak terjadi kecurangan dan manipulasi data agar murid baru dapat diterima di sekolah negeri. Ini menjadi keprihatinan kita. Kita tidak ingin ke-



Anggota DPD RI Agita Nurfianti saat raker Komite III DPD RI dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Pada masa lampau, banyak terjadi kecurangan dan manipulasi data agar murid baru dapat diterima di sekolah negeri. Ini menjadi keprihatinan kita. Kita tidak ingin kecurangan tersebut terjadi lagi di masa mendatang.**”

**Anggota Komite III
DPD RI,
Agita Nurfianti**

curangan tersebut terjadi lagi di masa mendatang,” katanya.

Dia menanyakan kepada Mendikdasmen apakah jalur domisili ini akan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW setempat atau menggunakan kartu keluarga (KK).

Sebab, ketika sistem PPDB menggunakan KK, masih banyak terjadi kecurangan dan manipulasi data.

“Jadi, bagaimana ketentuan untuk domisili ini agar tidak terjadi manipulasi data yang terjadi seperti di masa lalu? Karena untuk PPDB ini sangat menjadi perhatian orang tua siswa baik SD, SMP, maupun SMA. Mereka sangat menginginkan kejelasan dari proses SPB ini,” tanya Agita kepada Mendikdasmen.

Menanggapi hal ini, Mendikdasmen Abdul Mu'ti belum dapat menjawabnya secara langsung karena keterbatasan waktu dan akan menjawabnya secara tertulis. Selain itu, Mu'ti menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun Peraturan Mendikdasmen tentang SPMB dan sedang dalam proses sinkronisasi dengan Kementerian Hukum. (*)



Senator Minta Lanjutkan Program Beasiswa PIP

Helena AF Ojan

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tgk Ahmada, meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) melanjutkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang selama ini telah bergulir. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat menengah ke bawah dan mencegah anak putus sekolah di sejumlah pelosok Indonesia.

“Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) sangat efektif dalam menekan dan mencegah anak putus sekolah, terutama di daerah pemilihan saya di Provinsi Aceh,” ujar Tgk Ahmada dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, di Gedung DPD RI, Senin (3/2/2025).

Senator dari Aceh ini mengapresiasi program wajib belajar 13 tahun yang menjadi salah satu program prioritas Kemendikdasmen. Ia menyatakan, angka anak putus sekolah masih tinggi di wilayah barat Indonesia, khususnya di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena faktor ekonomi. Anak usia sekolah dipaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup.



Anggota DPD RI Tgk Ahmada. (Foto Tribunnews Aceh)

“**Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) sangat efektif dalam menekan dan mencegah anak putus sekolah, terutama di daerah pemilihan saya di Provinsi Aceh.**”

**Anggota DPD RI,
Tgk Ahmada**

Oleh karena itu, sambung Tgk Ahmada, solusi paling konkret untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah adalah dengan memberikan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Hanya saja, dia mengingatkan bahwa pemberian beasiswa PIP harus tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu anak didik dari

keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Karena itu, Tgk Ahmada berharap pemerintah tidak memangkas anggaran program beasiswa pendidikan. Pemerintah juga harus transparan dan akuntabel dalam mendata calon penerima bantuan beasiswa PIP.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengamini permintaan senator dari Aceh itu. Ia menyatakan, beasiswa PIP merupakan pendukung utama program wajib belajar 13 tahun yang menjadi terobosan Pemerintahan Presiden Prabowo. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk afirmasi pendidikan oleh masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, PAUD, serta fasilitasi relawan mengajar. (*)

Senator Minta Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Gratis

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendorong Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan program pendidikan gratis dan berkualitas, serupa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pendidikan gratis dan berkualitas lebih dibutuhkan, terutama bagi daerah di wilayah Indonesia timur yang merupakan daerah miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Usulan ini berdasarkan masukan saat saya turun ke masyarakat di Papua Barat Daya,” kata Paul Finsen Mayor dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, pemerintah telah melaksanakan program MBG, namun biaya pendidikan masih tidak gratis. Hal ini bisa menjadi tekanan psikologis bagi siswa yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan lainnya. Untuk mendorong pembangunan berkelan-



Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor. (Foto Dok Pribadi)

jutan, ia meminta dibuat program pendidikan gratis dan berkualitas.

Dia menegaskan bahwa dirinya bukan berarti tidak setuju dengan program makan bergizi gratis, namun ia mengimbau pemerintah juga untuk memprioritaskan pendidikan. Karena pendidikan merupakan investasi masa depan untuk putra-putri bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Saya merasa miris dengan biaya pendidikan yang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan tidak terjangkau bagi masyarakat. Ini yang lebih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

Lain lagi yang disampaikan anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi



Anggota DPD RI David Harold Waromi. (Foto Istimewa)

Papua, David Harold Waromi, yang mendesak pemberian kemudahan akses bagi anak-anak di Papua untuk menuju sekolah. Mengingat mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah, ditambah lagi dengan faktor geografis daerah Papua.

“Maka pada kesempatan ini kami meminta Pak Menteri bisa memberikan bus sekolah untuk anak-anak Papua menuju ke sekolah. Kasihan pak, anak-anak harus berjalan kaki jarak yang jauh ke sekolah,” kata David Harold dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Senin (3/2/2025). (*)

Banyak Sekolah di Sultra Tak Layak Pakai

Nanda Russia Rola

Penulis

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di daerah pemilihannya, Sulawesi Tenggara. Banyak ruang belajar di SD, SMP, dan SMA yang tidak layak pakai, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

“Kondisinya sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya di wilayah terpencil seperti Kepulauan Muna, Buton, Kolaka Raya, Konawe Kepulauan, dan Konawe,” kata Wa Ode Rabia dalam Rapat Kerja Komite III bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senin (3/2/2025).

Wa Ode Rabia menyebutkan persentase sekolah di Sulawesi Tenggara yang dikategorikan rusak: 13,20% untuk Sekolah Dasar (SD), 9,78% untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 12,26% untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia juga menyebutkan bahwa ada siswa Sekolah Dasar (SD) yang mengalami cedera akibat infrastruktur sekolah yang tidak memadai.



Anggota DPD RI Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan mendesak ini agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan layak bagi seluruh anak bangsa, terutama yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Menyangkut dengan keselamatan jiwa, hal ini perlu menjadi perhatian utama; tentu kita tidak mau hal ini terjadi menimpa guru dan peserta didik,” katanya.

Dalam rapat kerja tersebut, Komite III juga menyoroti beberapa permasalahan pendidikan yang saat ini masih sangat kompleks, seperti kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik,

keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan kesejahteraan antara guru aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN atau honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengaku terbuka atas semua aspirasi yang disampaikan oleh seluruh anggota Komite III DPD RI. Ia menyatakan bahwa pihaknya sangat fokus pada guru-guru honorer yang diangkat sebagai PPPK. “Kita saat ini sangat fokus pada guru-guru honorer yang diangkat sebagai PPPK untuk memenuhi standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia,” jelasnya. (*)

Susun RUU Hilirisasi Minerba Komite II Serap Aspirasi Daerah

Pada Masa Persidangan III Tahun 2024-2025, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah disibukkan dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Dalam penyusunan DIM tersebut, Komite II menyerap aspirasi ke sejumlah daerah.

Lela Sadiyah

Penulis

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menyampaikan bahwa penyusunan RUU Hilirisasi Minerba ini dilakukan untuk melahirkan regulasi perundang-undangan yang dapat menciptakan ekosistem pertambangan dan hilirisasi mineral dan batu bara yang dapat mendukung upaya peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik secara regional maupun nasional.

RUU ini akan memuat regulasi yang mengatur mengenai peningkatan nilai tambah hingga industrialisasi dan manufaktur yang berkelanjutan serta produk berteknologi tinggi. “Hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi masukan yang bersifat fundamental dalam menciptakan peraturan perundang-undangan



Suasana pertemuan Komite II DPD RI untuk menampung aspirasi masyarakat tentang DIM RUU Minerba. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

yang dapat memperbaiki dan mempertegas tata kelola hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia,” kata Badikenita dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Ternate, Maluku Utara, Senin (3/2/2025).

Senator asal Maluku Utara, Graal Taliawo, menekankan bahwa hilirisasi mineral dan batu bara perlu dikawal dengan regulasi perundang-undangan yang jelas. Sebab, hilirisasi pada komoditas mineral dan batu bara memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di daerah yang memiliki sumber daya mineral.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia, Maluku Utara tentunya memiliki kepentingan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Kebijakan hilirisasi mineral

dan batu bara sangat berdampak terhadap ekonomi Maluku Utara, utamanya investasi yang dilakukan di Pulau Halmahera. “Dengan dimanfaatkannya sumber daya mineral di Indonesia timur, suara masyarakat, khususnya Maluku Utara, harus didengar oleh para pemangku kepentingan,” kata Graal.

Dalam kunjungan kerja ke Maluku Utara tersebut, Komite II DPD RI mendengarkan masukan dari Pejabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, beserta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pejabat dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Maluku Utara, perwakilan Kadin Provinsi Maluku Utara, dan sejumlah akademisi di bidang lingkungan. (*)



RUU Hilirisasi Minerba Harus Akomodir Kepentingan Daerah



Wakil Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menyerahkan cendera mata kepada Sekda Sulawesi Selatan Jufri Rahman. (Foto Istimewa)

Adhi Nugroho

Penulis

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

RI Andi Abdul Waris Halid menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, agar RUU tersebut dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

“Kami mengundang seluruh *stakeholder* terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” kata Abdul Waris dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dalam rangka penyusunan

“**Kami mengundang seluruh *stakeholder* terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah.**”

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Makassar, Senin (3/2/2025).

Abdul Waris menegaskan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal. Kebijakan-

an ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan kerja Komite II DPD RI dalam menyusun RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.

“Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor mineral dan batu bara yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya dan berharap RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara akan melahirkan regulasi yang mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Menurut Jufri Rahman, hilirisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, *smelter*, hingga manufaktur. Ia menyebut perlunya *domestic market obligation* (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik. (*)

Peran Daerah Harus Jelas Dalam Hilirisasi Minerba

Nanda Russia Rola

Penulis

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Umar Bonte, merasa gerah dengan tata kelola hilirisasi mineral dan batu bara yang selama ini tidak mengutamakan kepentingan daerah. Dia menyebut daerah-daerah sering kali tidak dilibatkan dalam hilirisasi sebagai mitra pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan senator dari Sulawesi Tenggara itu pada pertemuan Komite II DPD RI dengan pejabat terkait dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, di Ternate, Maluku Utara, Senin (3/2/2025).

Senator asal Riau, Abdul Hamid, berpendapat bahwa perlu adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hilirisasi minerba agar peran daerah semakin jelas. Senator asal Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, setuju bahwa izin usaha pertambangan kecil perlu dipermudah. “Terkait izin, pertambangan kecil perlu diperjuangkan kewenangannya. Jika pusat yang



Foto bersama Komite II DPD RI usai mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemda Maluku Utara. (Foto Istimewa).

memberikan izin, kontrol terhadap pertambangan kecil harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

Senator asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, mengatakan bahwa pemerintah harus mengupayakan pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi, seperti jalan, air bersih, listrik, dan sinyal internet, karena semua itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Maluku Utara termasuk provinsi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi,” katanya.

Lis Tabuni, senator asal Papua Tengah, menyebutkan bahwa keberadaan pertambangan di daerah pemi-

lihannya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Hasil dari usaha pertambangan yang ada di daerah sepenuhnya diambil oleh pusat, sementara daerah hanya mendapatkan sisasisanya. “Hak daerah harus diperjuangkan agar dapat mengolah sumber daya alamnya sendiri demi kesejahteraan masyarakatnya,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan senator asal Papua Pegunungan, Matias Heluka. Dia menyebut Papua Pegunungan memiliki tambang emas, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. “Hilirisasi ini perlu diperjuangkan bersama-sama untuk kepentingan daerah,” kata Matias. (*)



Regulasi Hilirisasi Harus Memuaskan Masyarakat



Anggota DPD RI Eva Susanti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Theresia Oktavina

Penulis

Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, mengungkapkan bahwa hilirisasi telah memberikan manfaat luar biasa bagi perekonomian Maluku Utara. Namun, regulasi tertentu terkadang justru menghambat upaya hilirisasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi pemerintah dan masyarakat Maluku Utara.

“Regulasi pertambangan dan hilirisasi ini seharusnya mendekati pemerintah dan masyarakat daerah kepada rasa puas, bukan sebaliknya,” kata Samsuddin saat pertemuan dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ternate,

Maluku Utara, Senin (3/2/2025). Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.

Dia juga menyinggung pelarangan ekspor bijih nikel dan kewajiban hilirisasi yang telah menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Potensi penciptaan lapangan kerja di Maluku Utara dapat meningkat lebih besar lagi apabila hilirisasi nikel dilakukan hingga tahap produk akhir, seperti pembangunan pabrik mobil dan pabrik baterai. Saat ini, hilirisasi nikel masih terbatas pada produksi Ferro-Nickel (FeNi), yang bukan merupakan produk akhir.

Dia berharap hilirisasi dapat menciptakan “del-

tanisasi,” yaitu membentuk kehidupan baru yang memberikan penghidupan lebih baik bagi masyarakat dari hasil hilirisasi. Oleh karena itu, hilirisasi perlu diperdalam dan diperkuat agar manfaatnya dapat dimaksimalkan bagi masyarakat. Regulasi yang akan disusun dalam RUU ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola hilirisasi mineral dan batu bara sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Selama ini, daerah pertambangan telah berkontribusi terhadap pendapatan negara dan membuka banyak lapangan kerja. Namun, aktivitas pertambangan dan hilirisasi sering kali berbenturan dengan isu lingkungan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan regulasi yang dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pertambangan dan hilirisasi, sekaligus memastikan aspek lingkungan tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.

Sementara itu, pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyoroti kewenangan atas hilirisasi yang telah dialihkan kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan daerah kehilangan haknya untuk berperan aktif dalam proses hilirisasi. Pemprov Maluku Utara berharap kewenangan dalam hilirisasi dikembalikan kepada daerah agar kepentingan lokal dapat lebih terlindungi. (*)

Daerah Tambang Kok Miskin?

Rini Sumarni

Penulis

Daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang potensial, seperti pertambangan, seharusnya membawa dampak positif bagi perekonomian dan kemajuan daerah tersebut. Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Maluku Utara, Gajali Abdul Mutalib, menyoroti bahwa masih terdapat daerah di sekitar pertambangan di Maluku Utara yang tergolong miskin.

“Di Maluku Utara ada 10 kabupaten/kota. Ada daerah tambang yang justru menempati peringkat pertama sebagai daerah tertinggal. Daerah tambang *kok* miskin? Apakah pengelolaan dan kebijakan kita yang salah?” kata Gajali dalam pertemuan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pejabat terkait lainnya, membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, di Ternate, Maluku Utara, Senin (3/2/2025).

Gajali berpendapat bahwa perizinan untuk pertambangan kecil yang dikelola masyarakat perlu dipermudah agar



Aktivitas penambangan nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. (Foto Cermat)

masyarakat dapat memanfaatkan SDA mereka sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya. “Regulasi tambang-tambang kecil perlu dipermudah. Kalau tidak, masyarakat hanya menjadi penonton karena putra daerah tidak dapat memanfaatkan SDA-nya sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gajali berharap RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara yang tengah disusun dapat memberikan perhatian lebih terhadap pertambangan kecil. “Masyarakat jangan dipersulit. Kalau bisa, tanpa tender. Kalau dilakukan tender, sudah pasti kalah,” kata Gajali.

Pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Maluku Utara menyinggung kewenangan atas hilirisasi yang telah dialihkan kepada pemerintah pusat. Hal

ini menyebabkan daerah kehilangan haknya untuk berperan aktif dalam hilirisasi. Pemprov Maluku Utara berharap kewenangan dalam melakukan hilirisasi dapat dikembalikan kepada daerah agar kepentingan masyarakat setempat tetap terlindungi.

Sementara itu, pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara mengeluhkan bahwa daerah sama sekali tidak dilibatkan dalam hal kemitraan, khususnya dalam upaya merangkul pelaku usaha lokal di Maluku Utara agar dapat berperan aktif. DPMPTSP menegaskan perlunya penekanan terhadap peran daerah dalam mengelola SDA dan hilirisasinya demi kesejahteraan masyarakat setempat. (*)



Krisis Air Bersih di Lokasi Pertambangan dan Hilirisasi



Sejumlah desa yang berlokasi di sekitar pertambangan nikel di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara direndam banjir pada Juli 2024 lalu. Pegiat lingkungan menyebut penyebabnya karena adanya pembukaan lahan tambang nikel. (Foto Antara)

Helena AF Ojan

Penulis

Pakar lingkungan Muhammad Amin menyebutkan bahwa krisis air bersih dan degradasi biodiversitas merupakan dua isu penting yang perlu diperhatikan dalam sektor pertambangan dan hilirisasi. Kelangkaan air bersih di daerah lingkaran tambang menjadi permasalahan serius akibat migrasi masuk masyarakat ke wilayah tersebut.

Banyaknya pekerja tambang yang berdatangan menyebabkan semakin padatnya permukiman di sekitar tambang. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah sumur yang digali untuk mendapatkan air bersih dari bawah tanah. Namun, menurut Amin,

daerah lingkaran tambang tidak memiliki air tanah yang aman untuk dikonsumsi secara langsung. “Saya bisa membuktikan bahwa 97 persen masyarakat di daerah lingkaran tambang membeli air bersih di warung-warung,” ungkapnya.

“Krisis lingkungan yang paling penting dalam hilirisasi adalah krisis air bersih,” ujar Amin dalam pertemuan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, di Ternate, Maluku Utara, Senin (3/2/2025).

Selain itu, semakin padatnya permukiman juga menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, yang berkontribusi terhadap

risiko banjir. Bencana banjir ini diperparah dengan belum adanya peraturan gubernur (Pergub) ataupun peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur Daerah Aliran Sungai (DAS) di Maluku Utara.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menetapkan DAS di Maluku Utara agar pertumbuhan permukiman, terutama di sekitar pertambangan, dapat dikendalikan. Sementara itu, degradasi biodiversitas menjadi isu lain yang timbul akibat pembebasan lahan untuk pertambangan serta aktivitas pertambangan itu sendiri. “Terdapat 47 spesies tumbuhan endemik di daerah pertambangan Maluku Utara yang saat ini berstatus terancam (*vulnerable*),” ujar Amin.

Ia menekankan bahwa langkah paling penting untuk mengatasi krisis air bersih dan degradasi biodiversitas adalah melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan di tingkat lokal. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berkomitmen untuk mengembangkan sektor lingkungan di daerahnya, sehingga akademisi dapat berperan dalam memberikan masukan serta solusi terhadap isu-isu lingkungan dalam sektor pertambangan. (*)

Batam Fokus Bangun Infrastruktur Hilirisasi



Komite II DPD RI saat melakukan kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, merupakan salah satu daerah yang telah mendukung kegiatan hilirisasi pada komoditas mineral dan batu bara (minerba). Hilirisasi sendiri adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang bernilai lebih tinggi, serta merupakan langkah penting dalam pengembangan transformasi ekonomi berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut. Mereka mengadakan pertemuan dengan pejabat terkait

dan Pemerintah Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Senin (3/2/2025).

“Informasi mengenai situasi terkini, baik permasalahan, tantangan, maupun masukan dari para pemangku kepentingan dalam kegiatan hilirisasi minerba, sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, yang memimpin kunjungan kerja tersebut.

Kepala Dinas ESDM Kepulauan Riau, Muhammad Darwin, menjelaskan bahwa kegiatan hilirisasi di Kota Batam telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang No-

mor 3 Tahun 2020. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah pengolahan akan memperoleh dana bagi hasil sebesar 8 persen.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyatakan bahwa ke depan, Kota Batam akan berkembang menjadi kawasan industri, pariwisata, perdagangan, serta pusat sandaran kapal. “Kota Batam saat ini memfokuskan diri pada pengembangan infrastruktur, termasuk infrastruktur industri hilirisasi hasil bumi,” jelasnya.

Anggota Komite II DPD RI, seperti Bustami Zainudin, Muslim M. Yatim, dan Marthin Billa, menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi alih teknologi dalam sektor hilirisasi. “Jangan sampai kita malah mengimpor tenaga kerja. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegas Bustami.

Setelah pertemuan, Komite II DPD RI mengunjungi PT Batam Timah Sinergi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi mineral timah di Kota Batam. Dalam kunjungan lapangan tersebut, anggota Komite II DPD RI menyaksikan secara langsung proses pemurnian dan pengolahan timah dari hulu hingga menjadi *ingot* (timah batangan), yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi berbagai jenis *solder* sebagai bahan baku industri, yang merupakan produk hilir dari timah. (*)

Hilirisasi Jangan Impor Naker

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

RI, Angelius Wake Kako (AWK), menyebut bahwa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki potensi besar sebagai pusat dan sektor unggulan dalam pengembangan hilirisasi. Meskipun sumber daya alamnya terbatas, hilirisasi tetap menjadi sektor primadona bagi Kepri, terutama dengan dukungan kawasan Batam yang strategis.

Menurut AWK, Batam memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikannya kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan hilirisasi. Oleh karena itu, ia berharap regulasi yang tengah disusun dapat memberikan kepastian hukum serta skema bagi hasil yang adil antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita menyiapkan pa-yung hukumnya. Sampai saat ini, kita belum memiliki undang-undang khusus tentang hilirisasi. Jika revisi UU Minerba bisa diarahkan untuk mendukung hilirisasi, itu akan menjadi langkah maju,” ujar AWK



Rombongan Komite II DPD RI saat mengunjungi salah satu industri hilirisasi di Kota Batam. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

saat kunjungan kerja (kunker) Komite II DPD RI di Batam, Senin (3/2/2025).

Kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Kepulauan Riau ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Namun, senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja (naker) lokal dalam industri hilirisasi. “Kami pasti mendukung

hilirisasi, tetapi yang perlu didorong adalah bagaimana tenaga kerja lokal bisa terserap dengan baik. Jangan sampai industri berkembang, tetapi justru mengimpor tenaga kerja dari luar,” tegas AWK.

Selain itu, AWK juga menyoroti keterbatasan bahan baku sebagai tantangan utama dalam industri hilirisasi. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan ekspor bahan baku, sementara industri hilirisasi dalam negeri membutuhkan pasokan yang stabil, merupakan paradoks yang perlu dievaluasi. Kekurangan bahan baku mineral ini, di satu sisi, dapat menghambat keberlanjutan hilirisasi. (*)

Pabrik Pengolahan Singkong Harus Berpihak Pada Petani

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bustami Zainudin meminta pabrik pengolahan singkong di Lampung harus lebih berpihak kepada petani, menyusul harga komoditas yang rendah. Keberlanjutan industri singkong di Lampung tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja.

Arso P Nugroho

Penulis



Anggota DPD RI Bustami Zainudin. (Foto Istimewa)

Bustami menyebutkan, petani sebagai elemen utama dalam rantai pasok, harus mendapatkan keadilan dalam sistem harga. “Kita tahu selama ini pabrik sudah banyak untung. Mereka juga harus memahami kondisi petani yang sering merugi. Tanpa petani, pabrik tidak akan bisa ekspor, tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, hubungan yang saling menguntungkan ini harus dijaga,” kata Bustami dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Anggota DPD RI asal Lampung itu juga menyoroti wacana impor singkong yang kerap muncul saat harga di dalam negeri dianggap terlalu tinggi. Menurutnya, solusi terbaik bukanlah

“**Kita tahu selama ini pabrik sudah banyak untung. Mereka juga harus memahami kondisi petani yang sering merugi. Tanpa petani, pabrik tidak akan bisa ekspor, tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, hubungan yang saling menguntungkan ini harus dijaga.**”

**Anggota DPD RI,
Bustami Zainudin**

impor, melainkan meningkatkan hilirisasi di tingkat petani. Pabrik pengolahan singkong perlu diberikan

pendidikan dan pelatihan dalam hilirisasi.

Hilirisasi, menurut Bustami, akan memberikan nilai tambah bagi petani, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada harga jual singkong mentah. Ia mencontohkan bagaimana komoditas lain seperti sawit dan karet telah berhasil meningkatkan nilai ekonomi melalui pengolahan lebih lanjut.

“Pengusaha harus bisa memberikan perhatian lebih, agar ada nilai tambah bagi petani itu sendiri. Ini bukan hanya tentang singkong, tapi juga berlaku untuk komoditas lain seperti sawit dan karet. Inilah jalan keluar terbaik, bukan dengan mengimpor,” kata Bustami. (*)

DPD RI Berkomitmen Dukung Penguatan Sektor Jasa Keuangan

M. Fathoni

Penulis

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif.

“DPD RI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang memperkuat sektor jasa keuangan agar lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah,” kata Ahmad Nawardi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Senator dari Jawa Timur itu mengapresiasi upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menyelenggarakan pertemuan tahunan itu sebagai forum strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang lebih progresif dan berpihak kepada masyarakat luas.

“Kami mengapresiasi langkah OJK dalam mendorong stabilitas dan inklusivitas sektor jasa keuangan. Dengan regulasi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, industri,



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

“DPD RI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang memperkuat sektor jasa keuangan agar lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah.”

**Ketua Komite IV DPD RI,
Ahmad Nawardi**

serta masyarakat, kita dapat memastikan bahwa sektor keuangan tidak hanya berkembang secara makro, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah,” ujar

Ahmad Nawardi.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengusung tema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional”. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, industri keuangan, akademisi, dan pelaku usaha.

Dalam pertemuan tersebut, mereka secara bersama-sama membahas strategi dan tantangan sektor jasa keuangan pada tahun 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. (*)

GMNI Dukung Penguatan DPD RI

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menekankan bahwa di tengah keterbatasan kewenangan yang dimiliki lembaga yang dipimpinnya dan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, DPD RI akan tetap bekerja maksimal dan tidak mengurangi kekuatannya dalam merepresentasikan persoalan daerah kepada pusat.

Salah satunya adalah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. “Urgensi RUU Daerah Kepulauan yang diusung DPD RI sebagai sarana penguatan dan mengurangi kesenjangan antar-daerah,” kata Sultan didampingi Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media (PHM) Setjen DPD RI Mahyu Darma, ketika menerima audiensi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Pada kesempatan itu, Sultan B Najamudin juga mengajak mahasiswa yang tergabung dalam GMNI itu untuk aktif terlibat dalam organisasi dan belajar politik sejak muda. “Teman-teman punya potensi dan



Ketua DPD RI didampingi Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma saat menerima audiensi GMNI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kemampuan luar biasa, dan jangan kalah dengan yang punya sumber daya kekuatan dalam politik saat ini. Ide dan gagasan anak muda sangat diperlukan,” kata Sultan.

Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi menyatakan dukungan kepada DPD RI dalam memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan segera disahkan sebagai undang-undang. “Kami akan menyuarakan narasi pentingnya RUU Daerah Kepulauan ini. Kami berharap RUU ini bisa gol dan disahkan, tidak hanya keluar masuk prolegnas,” kata Imanuel Cahyadi.

Immanuel menambahkan, daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia dan yang bercirikan kepulauan sangat mendambakan pemerataan pembangunan. Mereka juga ingin maju dalam pengelolaan

sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alamnya, dan tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat.

GMNI juga melihat DPD RI sebagai lembaga representasi daerah sudah selayaknya diberi kewenangan dan penguatan. Dengan demikian, DPD RI diharapkan mampu mewujudkan penguatan pembangunan yang Indonesia sentris, serta mampu menjadi jembatan atas ketimpangan kesenjangan pembangunan di Jawa dan luar Jawa, di wilayah barat dan timur.

“Saya mengapresiasi dukungan GMNI kepada DPD RI dalam mendorong dan mengamplifikasi agar RUU Daerah Kepulauan tersebut segera disahkan menjadi undang-undang, serta dalam penguatan kewenangan DPD RI,” kata Sultan yang juga mantan aktivis kepemudaan itu mengakhiri pertemuan. (*)

Nuh Kecam Donald Trump Mau Ambil Alih Jalur Gaza

Helena AF Ojan

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Nuh sangat prihatin dan menolak tegas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau mengambil alih Jalur Gaza dan menemukannya di bawah kendali Amerika.

“Rencana itu tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, tetapi juga melanggar kedaulatan Palestina sebagai bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Gaza adalah bagian dari tanah Palestina yang sah dan rakyat Gaza telah lama menderita akibat konflik yang berkepanjangan,” tegas Muhammad Nuh, Senin (10/2/2025).

Rencana pengambilalihan Jalur Gaza oleh Donald Trump, disebut Nuh hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina dan mengabaikan hak-hak dasar, serta merongrong kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Karena itu dia mendesak Pemerintah Indonesia, memiliki kewajiban moral un-

“Rencana itu tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, tetapi juga melanggar kedaulatan Palestina sebagai bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Gaza adalah bagian dari tanah Palestina yang sah dan rakyat Gaza telah lama menderita akibat konflik yang berkepanjangan.”

Anggota DPD RI,
Muhammad Nuh

tuk menolak segala bentuk intervensi yang merugikan rakyat Palestina dari Amerika Serikat.

Nuh mendesak Pemerin-

tah Indonesia untuk terus memperkuat peran aktifnya dalam diplomasi internasional. Indonesia harus menjadi suara yang lantang dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat Palestina di forum-forum global, seperti diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihentikan.

“Sebagai bangsa yang pernah berjuang melawan penjajahan, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menolak segala bentuk intervensi yang merugikan rakyat Palestina dari Amerika Serikat,” katanya.

Nuh juga menyerukan kepada seluruh masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengambil langkah tegas dalam mencegah rencana Donald Trump tersebut. Kedaulatan suatu bangsa adalah hak yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau ekonomi pihak lain. Rakyat Palestina berhak hidup dalam damai, merdeka, dan bermartabat tanpa tekanan atau intervensi dari kekuatan asing,” tegasnya. (*)



Anggota DPD RI Muhammad Nuh.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Senator Lalita Soroti Sampah Berserakan di Batam

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Papua Lalita menyoroti permasalahan sampah dan kondisi lingkungan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Batam, Senin (9/2/2025), ia kaget melihat sampah yang banyak berserakan di pinggir-pinggir jalan.

Dalam bayangannya, Kota Batam sebagai kota indah dengan potensi besar yang sering dibandingkan dengan Singapura, justru memiliki beberapa titik yang kurang terawat. “Kemarin saya tiba, saya diajak ke satu wilayah. Ternyata sampah berserakan di pinggir jalan. Agak bingung juga saya melihat,” katanya.

Tidak hanya soal sampah, Lalita juga menyoroti kondisi perumahan warga di sejumlah kawasan di kota tersebut. Adanya rumah-rumah tidak layak huni yang membingungkannya. Karena itu, dia mempertanyakan apakah kawasan tersebut merupakan hutan lindung atau sudah menjadi wilayah pemukiman legal.

Lalita mengaku baru untuk pertama kali mengunjungi Kota Batam dan



Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Lalita. (Foto Batam Pos)

“**Untuk pemerintah di Batam, coba tolong dikoordinasikan (persoalan sampah). Ditindaklanjuti, jangan dibiarkan lagi.**”

**Anggota Komite II
DPD RI, Lalita**

merasa belum sepenuhnya memahami persoalan sampah di kota tersebut. Kendati demikian, ia menilai masalah sampah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah setempat. “Untuk pemerintah di Batam, coba tolong dikoordinasikan (persoalan sampah). Ditindaklanjuti, jangan dibiarkan lagi,” katanya.

Menurut Lalita, sampah

yang berserakan ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mencoreng citra Batam sebagai kawasan strategis yang banyak menarik perhatian wisatawan dan investor. Ia pun menyayangkan jika keindahan Batam ternoda akibat pengelolaan lingkungan yang kurang maksimal.

Saat mendengar bahwa masalah sampah di Batam ternyata sudah berlangsung cukup lama, Lalita mengaku semakin prihatin. Ia meminta pemerintah setempat untuk segera mencari solusi yang konkret agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut. “Ternyata masalah ini sudah lama, ya? Ya, minta tolong pemerintah setempat untuk diperhatikan. Cari solusinya untuk Batam lebih indah,” ujarnya dikutip Batam Pos. (*)

OJK Luncurkan IASC Sultan: Bisa Tekan Judol

Betria Eriani

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi inovasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meluncurkan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Menurutnya, inovasi OJK tersebut sangat penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan di era digital.

“Saya kira inovasi teknologi IASC sangat urgen di tengah maraknya penipuan seperti pinjaman *online* (pinjol) dan judi *online* (judol). Kejahatan keuangan digital merupakan kejahatan lintas negara yang berpotensi mengganggu perekonomian nasional,” kata Sultan usai menghadiri acara Pertemuan Tahunan OJK, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sultan memberikan atensi serius terhadap isu judi *online* dan pinjol yang seringkali merugikan masyarakat di daerah. Dia menginginkan dengan adanya sistem *Anti-Scam* ini bisa mendeteksi semua aktivitas transaksi masyarakat yang mengarah pada aktivitas ekonomi *underground*. Dengan IASC, diharap-



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (barisan belakang) saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan OJK. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kan dapat melindungi masyarakat dari penipuan secara *online*.

Seperti diketahui, OJK meluncurkan IASC dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU). Peluncuran IASC dan SIPELAKU bertujuan meningkatkan integritas sektor jasa keuangan. IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), dan pelaku industri jasa keuangan untuk penanganan penipuan (*scam*) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyebutkan bahwa pem-

bentukan IASC dilakukan untuk merespons semakin maraknya penipuan di sektor keuangan yang terjadi saat ini dan semakin besarnya nominal dana korban yang hilang. Saat ini IASC telah didukung oleh asosiasi industri perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan *e-commerce*,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar.

“Penipuan atau *scamming* di sektor keuangan adalah kejahatan yang tidak ada batasnya dengan dampak yang sangat besar dan luas, sehingga upaya penanganannya dengan pembentukan IASC harus segera dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat,” kata Mahendra Siregar. (*)

Transformasi BUMN Penting Untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi



Ketua KWP Ariawan menyerahkan cendera mata kepada Bedikenita Boru Sitepu. (Foto Panitia)

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penting dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, saat ini perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada investasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbang sekitar 70 persen dari pertumbuhan ekonomi.

“Transformasi BUMN harus menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan strategi yang tepat, BUMN bisa menjadi pilar fundamental perekonomian nasional,” ujar Ketua Komite II

DPD RI Bedikenita Br Sitepu ketika berbicara dalam seminar nasional dengan tema “Transformasi BUMN Menjadi Pilar Fundamental Perekonomian Nasional”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dalam seminar yang digelar Koordinatorkan Wartawan Parlemen (KWP) itu, Bedikenita menyebut investasi skala besar, termasuk peran BUMN, masih terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi BUMN melalui restrukturisasi dan efisiensi sangat diperlukan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara melalui dividen dan pajak.

Badikenita juga menyoroti dampak globalisasi yang semakin menekan daya saing industri dalam negeri. Produk impor yang membanjiri pasar domestik menjadi tantangan besar bagi sektor manufaktur dan BUMN yang bergerak di bidang produksi. Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen barang jadi dengan daya saing tinggi di pasar global.

Sebagai langkah konkret, Bedikenita merekomendasikan percepatan adopsi teknologi digital dalam operasional BUMN, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel. Di samping itu, *Corporate Social Responsibility (CSR)* BUMN agar lebih berdampak langsung pada masyarakat sekitar.

Di akhir paparannya, Bedikenita mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan akademisi, untuk terus mengawal transformasi BUMN demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)



Fraksi Sub Wilayah Timur II untuk Perubahan Positif Daerah



Suasana rapat anggota DPD RI Sub Wilayah Timur II di The Alana Conference and Centre, Sentul, Bogor, Kamis (27/01/2025).
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku, Nono Sampono, mendorong agar Sub Wilayah Timur II diubah menjadi fraksi yang memiliki kekuatan hukum dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dengan dasar hukum yang jelas, setiap tindakan yang diambil diharapkan lebih efektif dalam membawa perubahan positif bagi daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat kegiatan anggota DPD RI Sub Wilayah Timur II di The Alana Conference and Centre, Sentul, Bogor, Kamis (27/01/2025).

Menurutnya, fraksi dengan kekuatan hukum akan menjadi wadah koordinasi yang lebih terstruktur dalam menginventarisasi berbagai permasalahan di wilayah Timur II. Mekanisme ini

diharapkan dapat meningkatkan akses komunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat lebih tersampaikan secara efektif.

“Saya berharap hasil pembahasan ini bisa menjadi dasar yang kuat dalam menentukan langkah-langkah strategis ke depan. Kita harus memastikan bahwa Sub Wilayah Timur II memiliki posisi yang jelas dan kuat secara hukum, sehingga saat kita turun ke daerah, kita dapat benar-benar mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Nono Sampono.

Selain itu, pembentukan fraksi ini juga diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini masih menghadapi banyak tantangan di wilayah Timur II, seperti keterbatasan akses

terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan yang belum merata.

Nono menekankan pentingnya tindak lanjut konkret pasca-rapat agar gagasan ini dapat segera direalisasikan. Ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara berbagai pihak harus diperkuat guna memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif di seluruh daerah.

“Melalui rapat ini, kita harus segera mengambil langkah nyata agar Sub Wilayah Timur II benar-benar menjadi representasi yang kuat dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Sinergi erat antara pemerintah, masyarakat, dan fraksi yang terbentuk akan menjadi kunci dalam membangun kebijakan yang inklusif serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah,” tutupnya. (*)

Sultan Tanggapi #kaburajadulu:

Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia

Rini Sumarni

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menanggapi fenomena ajakan berpindah kewarganegaraan yang viral di media sosial dengan tanda pagar #KaburAjaDulu. Ia menyebut fenomena ini sebagai bagian dari dinamika globalisasi yang wajar di era tanpa batas (*borderless*). Selain itu, menurutnya, hal ini juga terkait dengan bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, di mana jumlah usia produktif lebih dominan dibanding kelompok usia lainnya.

Dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025), Sultan menilai tren ini sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan peluang bagi anak muda Indonesia untuk berkarier di luar negeri. Namun, ia mengingatkan agar mereka tidak terpengaruh begitu saja oleh konten kreator yang mempromosikan ajakan tersebut seolah-olah kehidupan di Indonesia tidak layak. Ia menegaskan bahwa sejarah bangsa menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah ter-

hadap keadaan.

Di sisi lain, Sultan menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko yang bisa muncul dari keputusan bekerja atau menetap di luar negeri. Ia mengingatkan agar calon pekerja migran tetap mematuhi prosedur hukum dan aturan keimigrasian, serta menghindari modus penipuan yang marak terjadi di dunia digital.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya keras menciptakan lapangan kerja baru dan mengoptimalkan potensi generasi muda di berbagai daerah. Pemerintah juga tengah mempersiapkan sumber daya manusia unggul, termasuk bagi mereka yang ingin berkarier di luar negeri dengan dukungan kebijakan yang lebih terstruktur.

Menurut Sultan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan pangsa pasar yang sangat besar, yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk serta tantangan bonus demografi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong

program hilirisasi industri, swasembada pangan dan energi, serta proyek padat karya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa mencari peluang kerja atau berbisnis di luar negeri merupakan pilihan yang sah bagi anak muda. Namun, ia mengingatkan agar dalam mengambil keputusan tersebut, mereka tetap menghargai tanah kelahiran dan kontribusi negara terhadap perkembangan diri mereka. Pemerintah membutuhkan dukungan dari generasi muda dalam membangun bangsa, bukan sebaliknya. (*)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM DPD RI)

Senator Erni Prihatin atas Fenomena #KaburajaDulu

Helena AF Ojan

Penulis

Jakarta, 18 Februari 2025 – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, menanggapi serius fenomena tagar #KaburajaDulu yang ramai di media sosial. Tagar ini mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap minimnya peluang kerja serta kondisi ekonomi yang dianggap belum memberikan kesempatan yang layak. Menurutnya, respons yang meremehkan aspirasi anak muda hanya akan memperburuk kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Fenomena ini, lanjut Erni, menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin besar antara harapan generasi muda dan realitas di lapangan. Banyak dari mereka merasa terpaksa mencari masa depan di luar negeri karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang sesuai. “Jika pemerintah tidak segera bertindak, Indonesia berisiko kehilangan sumber daya manusia potensial yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” kata Erni, Selasa (18/2/2025) di Jakarta.

Erni juga menyoroti bahwa meningkatnya jumlah tenaga kerja migran tidak boleh dianggap sebagai tren



Senator Erni Daryanti (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

biasa. Menurutnya, ini adalah indikator bahwa kebijakan ketenagakerjaan di dalam negeri masih belum cukup efektif dalam menciptakan peluang yang setara. Ia menekankan bahwa kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi perhatian utama jika Indonesia ingin mempertahankan talenta mudanya.

Komite III DPD RI mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada generasi muda. Langkah konkret yang perlu diambil antara lain penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan pelatihan keterampilan, serta iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, anak muda tidak perlu merasa terpaksa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Menurut Erni, generasi muda adalah aset masa depan bangsa yang harus diperhatikan dengan serius. Pemerintah harus peka terhadap aspirasi mereka dan memberikan solusi nyata, bukan sekadar pernyataan yang dapat semakin merusak kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa langkah strategis dalam ketenagakerjaan harus segera diambil agar bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak menjadi sia-sia.

Sebagai bagian dari komitmennya, Komite III DPD RI akan terus mengawal isu ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga migran dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan serta BP2MI untuk segera mengambil langkah nyata dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia. (*)

Tanah Adat Dirampas, Senator Penrad Siagian Tuntut Pemerintah Audit PT TPL



Senator asal Sumatera Utara Pdt. Penrad Siagian (Foto MBD.com)

Adhi Nugroho

Penulis

Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mendesak transparansi luas konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai memicu konflik berkepanjangan di berbagai kabupaten di Sumatera Utara. Ia menilai ketidaktahuan masyarakat mengenai status lahan yang masuk dalam konsesi perusahaan menjadi pemicu utama konflik yang sering berujung pada aksi kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga.

Menurut Penrad dalam rilisnya Minggu (16/2/2025), PT TPL kerap bersinggungan dengan masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur mereka. Ia menyoroti kewajiban perusahaan dalam

menyelesaikan konflik tenurial sesuai Perpres 86 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 84 Tahun 2016, namun hingga kini dinilai belum dijalankan. Untuk itu, ia mengajukan empat langkah konkrit, yaitu transparansi luas konsesi, penyelesaian konflik tenurial, audit sosial dan lingkungan, serta mediasi *stakeholder*.

Penrad menegaskan bahwa konflik tenurial tidak boleh terus berlarut-larut dan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, segera turun tangan. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani konflik agraria, bukan tindakan represif. "Saya akan memastikan ada proses penyelesaian yang nyata demi keadilan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Penrad mengunjungi Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan dan Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) di Kabupaten Simalungun, Sumut, yang telah lama berkonflik dengan PT TPL. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Jhontoni Tarihoran, menyampaikan apresiasi atas komitmen Penrad dalam mendukung pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Lamtoras, Mangitua Ambarita, mengungkapkan bahwa intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus terjadi sejak 2003. Ia mencontohkan penangkapan seorang anggota komunitasnya pada Juli 2024 yang dilakukan secara represif tanpa prosedur jelas.

Menanggapi hal itu, Penrad berjanji terus memperjuangkan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat agar masyarakat adat memiliki perlindungan hukum yang kuat atas tanah ulayat dan sumber daya alam. "Perjuangan ini membutuhkan gerakan kolektif. Kita harus bersama-sama memastikan hak masyarakat adat dihormati," tegasnya. [*]



Nono Dorong Pemanfaatan Nuklir dalam Diversifikasi Energi Nasional

Betria Eriani

Penulis

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Nono Sampono, menekankan perlunya revolusi dalam tata kelola Pertamina untuk menghadapi tantangan sektor minyak dan gas nasional. Ia menyoroti pentingnya inovasi dan strategi baru guna memastikan ketahanan energi yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Auditorium Kantor Walikota Balikpapan, Senin (17/2/2025). Kunjungan ini dihadiri Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Pertamina dan SKK Migas.

Nono Sampono menegaskan bahwa selain mengoptimalkan potensi gas, Indonesia perlu mempertimbangkan teknologi nuklir sebagai opsi diversifikasi energi. Ia menilai pemanfaatan energi nuklir

dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Produksi minyak Indonesia mengalami penurunan akibat faktor usia lapangan minyak, kendala operasional, gangguan teknis, serta ketidakseimbangan antara sumber daya dan kebutuhan energi nasional. Sementara itu, konsumsi minyak bumi terus meningkat, sehingga kesenjangan tersebut harus ditutupi dengan impor yang membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Eksplorasi ladang minyak dan gas

baru juga menghadapi tantangan besar, termasuk tingginya biaya investasi serta tekanan global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dalam pertemuan ini, Komite II DPD RI menyoroti pentingnya kebijakan yang dapat mendukung investasi di sektor energi sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Komite II DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan energi nasional melalui pengawasan dan advokasi agar regulasi yang diterapkan mampu menjawab tantangan masa depan sektor migas dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (*)



Senator Nono Sampono.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DOB, Jembatan Menuju Pemerataan Pembangunan



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Adhi Nugroho

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung dalam Musyawarah Nasional (Munas) Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan DOB (Forkonas PP DOB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025) menegaskan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan jembatan menuju pemerataan pembangunan dan penguatan demokrasi lokal.

“DOB bukan sekadar kebijakan, tetapi sebuah lompatan besar menuju masa depan yang lebih gemilang.

DOB adalah langkah maju untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat terwujudnya keadilan distributif di setiap jengkal wilayah republik ini,” tegas Tamsil.

Tamsil menilai Munas Forkonas DOB bukanlah sekadar pertemuan biasa, melainkan penegasan bahwa aspirasi rakyat untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif tidak boleh terhenti di tengah jalan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini terdapat 337 usulan DOB di 36 provinsi. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pemerataan pembangunan.

Tamsil Linrung menilai moratorium pembentukan DOB beberapa tahun terakhir memang dilematis. Ada kekhawatiran terhadap beban fiskal negara dan potensi kegagalan DOB. Namun di sisi lain, ada tuntutan rakyat yang semakin kuat agar pemerintah membuka kembali peluang pemekaran wilayah.

Sebagai solusi, DPD RI mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 untuk menyusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Dengan adanya Desartada, proses pembentukan DOB dapat dilakukan lebih selektif dan berkualitas, sehingga tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

“DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi daerah dalam kerangka otonomi yang berkualitas. Apa yang diperjuangkan Forkonas DOB ini sejalan dengan misi DPD RI untuk memastikan daerah memiliki hak yang setara dalam pembangunan nasional,” kata senator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu. (*)

Korban Bencana Alam Mengadu ke DPD RI

Helena AF Ojan

Penulis

Korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadu ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Selain itu, BAP DPD RI juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Pengawas Penyelenggara Triaspolitika Nusa Tenggara Timur (LP2TRI) Hendrikus Djawa mengungkapkan bahwa sebanyak 15.000 petani rumput laut menjadi korban tumpahan minyak Montara dan 53.400 masyarakat korban bencana alam siklon tropis Seroja belum menerima haknya. Biaya ganti rugi petani rumput laut sebesar Rp2 trilyun, sedangkan korban bencana alam siklon tropis sebesar Rp849,3 milyar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

”Kami memohon bantuan BAP DPD RI untuk memfasilitasi korban terdampak tumpahan minyak di Montara yang belum menerima ganti rugi dan bantuan dana korban bencana badai Se-



BAP DPD RI menerima audiensi para pihak pengadu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

roja di NTT yang tidak ada transparansi sesuai surat pengaduan yang kami kirim,” kata Hendrikus saat audiensi dengan BAP DD RI.

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan permasalahan yang bermula dari hadirnya PTPN XIV dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN). Masyarakat tak membangun pemukiman yang permanen karena takut digusur oleh kedua perusahaan tersebut karena berada di dalam HGU oleh kedua perusahaan tersebut, walaupun masyarakat lebih dahulu memilikinya.

Masalah sengketa lahan lainnya yaitu dari perwakilan dari Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus, Kecamatan Limapuluh, Provinsi Sumatera Utara yang me-

minta penundaan pembaharuan perpanjangan lahan PT Socfindo Tanah Gambus pada 2023 dan mengeluarkan lahan masyarakat yang kelebihan ukur dari HGU PT. Socfindo Tanah Gambus. ”Masyarakat memohon bantuan BAP DPD RI sebagai harapan terakhir untuk memfasilitasi masalah ini kepada Kementerian ATR/BPN,” pinta Ruslan, perwakilan Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus.

Menanggapi pengaduan itu, Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim berjanji akan menindaklanjuti dengan mengagendakan untuk mengundang pihak-pihak terkait. ”Kami akan mengundang kementerian terkait dan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak masyarakat akan terlindungi,” kata Abdul Hakim. (*)

Diplomatic Coffee Morning Bahas Kepemimpinan Perempuan

Lela Sa'diah

Penulis

Dalam rangka memperkuat dialog diplomatik dan meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan, Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menggelar *Diplomatic Coffee Morning* bertema “Peran Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan” di Plaza DPD RI, Jakarta, Rabu (27/2/2025). Acara ini menghadirkan Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, sebagai pembicara utama serta dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPD RI.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik harus lebih dari sekadar angka statistik. “Perempuan bukan hanya bagian dari sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga pemimpin yang menentukan arah kebijakan. Demokrasi yang matang memberi ruang bagi perempuan untuk bersuara dan berkontribusi secara maksimal,” ujarnya.

Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, menyoroti pentingnya representasi perempuan dalam politik sebagai pilar utama demokrasi. Ia menyebutkan bahwa 55 dari 152 anggota



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyerahkan cinderamata kepada Dubes Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DPD RI adalah perempuan, mencerminkan keterwakilan yang signifikan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar perempuan dapat berperan lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan.

Duta Besar Lilla Karsay menyoroti bahwa negara dengan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dalam politik cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik dan masyarakat yang lebih inklusif. Ia mencontohkan pemimpin perempuan dunia seperti Katalin Novák (Presiden Hongaria), Angela Merkel (Kanselir Jerman), dan Jacinda Ardern (Perdana Menteri Selandia Baru) yang berhasil membawa perubahan besar dalam pemerintahan mereka.

Diskusi ini juga membahas tantangan yang masih

dihadapi perempuan dalam dunia politik, termasuk stereotip gender dan hambatan struktural. BKSP DPD RI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pelatihan, mentoring, serta kebijakan afirmatif guna memperluas partisipasi mereka dalam politik.

Sebagai penutup, *Diplomatic Coffee Morning* ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama diplomatik antara Indonesia dan Hongaria yang telah terjalin selama 70 tahun. Diharapkan, acara ini dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk mengambil peran aktif dalam politik serta menciptakan kebijakan yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat. (*)



Kolaborasi Efektif dalam Manajemen Kepegawaian Pusat dan Daerah



Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Nanda Russia Rola

Penulis

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menegaskan pentingnya sistem manajemen kepegawaian yang lebih kolaboratif dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan dalam acara Executive Brief bertema Sistem Manajemen Kepegawaian yang Kolaboratif dan Efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Kantor DPD RI, Kamis (27/2/2025).

GKR Hemas menyoroiti bahwa tata kelola kepegawaian yang terpadu akan mendorong efisiensi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayan-

“Kolaborasi ini harus diwujudkan agar sistem kepegawaian dapat berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

**Wakil Ketua DPD RI
GKR Hemas**

an publik. Ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. “Kolaborasi ini harus diwujudkan agar sistem kepegawaian dapat berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi

perhatian adalah afirmasi proporsi pengangkatan ASN bagi daerah otonomi khusus. GKR Hemas menyoroiti bahwa hingga kini hanya Papua Raya yang memiliki afirmasi jumlah Orang Asli Papua (OAP) dalam rekrutmen ASN, sementara Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mendapatkan kejelasan dalam regulasi. Ia berharap hal ini dapat diakomodasi dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2023 tentang ASN.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari D.I. Yogyakarta dan Papua. Berbagai tantangan terkait digitalisasi sistem kepegawaian, serapan belanja pegawai, serta kendala teknis dalam birokrasi turut dibahas secara komprehensif.

Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai langkah awal perancangan kebijakan kepegawaian yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan zaman. GKR Hemas menutup acara dengan menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pemerintah daerah agar tidak ada regulasi yang membingungkan. (*)

Dana Otsus Dipotong, Senator Filep Protes

Adhi Nurgoro

Penulis

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, yang berdampak pada pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 menetapkan pemotongan enam item dana, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa.

Senator Papua Barat, Filep Wamafma, mengkritik keputusan ini karena pemotongan dana Otsus dan DBH mengurangi hak masyarakat. Ia menegaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga tidak seharusnya terkena pemotongan. Filep juga menyoroti ketidakadilan dalam sistem anggaran yang hanya memungkinkan Pemda menggunakan dana reguler, sementara dana cadangan dipotong.

Pada Kamis (27/2/2025), Filep menegaskan bahwa pemangkasan dana Otsus bertentangan dengan UU Otsus Papua yang meng-



Anggota DPD RI dari Papua Barat, Filep Wamafma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

amanatkan alokasi anggaran untuk pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP) serta layanan kesehatan. Ia mempertanyakan bagaimana nasib beasiswa siswa dan guru, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta penyediaan tenaga medis berkualitas di Papua akibat kebijakan ini.

Sebagai akademisi hukum, Filep menilai efisiensi anggaran dengan cara pemotongan dana Otsus mencederai hak-hak dasar masyarakat. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali KMK 29/2025 dan mengeluarkan dana Otsus dari skema pemotongan. Menurutnya, efisiensi seharusnya dilakukan dengan menekan pemborosan anggaran dan mengutamakan perampasan aset hasil korupsi.

Filep mengajukan empat rekomendasi kepada peme-

rintah. *Pertama*, mengalihkan dana Otsus dari kebijakan efisiensi. *Kedua*, mempercepat regulasi perampasan aset koruptor untuk mengurangi kebocoran keuangan negara. *Ketiga*, menyesuaikan kembali program makan bergizi gratis agar lebih diarahkan pada investasi pendidikan dan kesehatan jangka panjang. *Keempat*, pejabat publik harus menekan pemborosan anggaran pada kegiatan seremonial yang tidak mendesak.

Dengan pemotongan ini, Filep mengingatkan bahwa masyarakat Papua dan daerah lain yang terdampak akan mengalami kesulitan dalam berbagai sektor esensial. Ia berharap pemerintah bersikap adil dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan fiskal. (*)



LaNyalla Ajak Mahasiswa Kembali ke Pancasila



Anggota DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti di tengah mahasiswa di Surabaya. (Foto LaNyalla Centre)

Betria Eriani

Penulis

Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa aksi mahasiswa dengan tagar “Indonesia Gelap” merupakan bentuk kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Ia mengajak mahasiswa berpikir lebih kritis dengan menelaah persoalan fundamental, yaitu perubahan konstitusi yang membuat Indonesia kehilangan kedaulatan, berdikari, dan kepribadian. Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Surabaya, Kamis (27/2/2025).

Dalam acara yang dihadiri perwakilan BEM dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya serta organisasi kepemudaan, LaNyalla mengungkapkan bahwa liberalisme

“Sejak reformasi, utang negara semakin membengkak dan investasi asing tidak memberi dampak nyata bagi rakyat. Justru bantuan sosial dan subsidi terus meningkat, menandakan ekonomi rakyat tidak membaik.”

Anggota DPD RI,
AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti

masuk ke Indonesia secara sistematis sejak era kolonial hingga reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 menggeser sistem ekonomi dan politik nasional ke arah yang menguntungkan kapitalisme global.

“LaNyalla menilai sistem politik yang mengandalkan ‘one man one vote’ telah melahirkan oligarki ekonomi dan politik, di mana segelintir orang menguasai 80 persen kekayaan negara. Akibatnya, rakyat miskin dijadikan alat politik dalam demokrasi transaksional, sementara utang negara terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bagaimana sumber daya alam Indonesia dikuasai asing, sementara produk hasil pengolahan impor kembali dijual ke dalam negeri. “Sejak reformasi, utang negara semakin membengkak dan investasi asing tidak memberi dampak nyata bagi rakyat. Justru bantuan sosial dan subsidi terus meningkat, menandakan ekonomi rakyat tidak membaik,” tambahnya.

Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk memahami kembali pemikiran para pendiri bangsa yang menolak liberalisme. Menurutnya, solusi bagi Indonesia adalah kembali ke konstitusi asli UUD 1945, yang mencerminkan Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila demi kedaulatan nasional.

LaNyalla juga mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif. Ia lebih mendukung kebijakan pendidikan gratis agar memberi dampak nyata bagi masa depan bangsa. (*)

KASUS PAGAR LAUT

Komite I Minta Penjelasan Menteri ATR

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menaruh perhatian serius terhadap permasalahan pagar laut yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Keberadaan pagar laut tidak hanya mengganggu ekosistem pesisir, tetapi juga merampas hak masyarakat, terutama nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut.



Komite I DPD RI sedang meminta penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid soal pemagaran laut. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Theresia Oktavina

Penulis

Sehubungan dengan itu, Komite I DPD RI mengundang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam rapat kerja pada Selasa (11/2/2025). Dalam rapat tersebut, Komite I DPD RI mempertanyakan legalitas pemagaran laut yang dilakukan oleh pihak tertentu. Bahkan, pagar laut tersebut diklaim telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB).

“Adanya klaim dari pihak tertentu yang membangun pagar atau pembatas di sepanjang garis pantai di wilayah pesisir dan laut tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemagaran ini, yang seharusnya menjadi akses publik, sangat merugikan

masyarakat, khususnya nelayan,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhti.

Muhti juga mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah. Ia menyoroti pernyataan Nusron Wahid sebelumnya yang mengungkapkan bahwa praktik pemagaran laut ilegal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum dalam struktur pemerintahan. “Meski upaya ini membutuhkan waktu dan perjuangan yang tidak mudah, kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan ke depan,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas terkait permasalahan pagar laut tersebut. Kementerian ATR/BPN telah membatalkan hak

atas tanah terkait dan melakukan audit serta investigasi terhadap proses penerbitan sertifikatnya. “Kami telah melakukan penegakan disiplin dengan merekomendasikan pencabutan lisensi Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, kami juga memberikan sanksi berat kepada pejabat di ATR yang terbukti melakukan pelanggaran,” jelas Nusron.

Lebih lanjut, Nusron memaparkan program 100 hari kerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan menata ulang sistem serta tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) agar lebih berkeadilan. “Penataan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya. (*)

RPJMN dan RKP 2025 Harus Menyentuh Kebutuhan Daerah

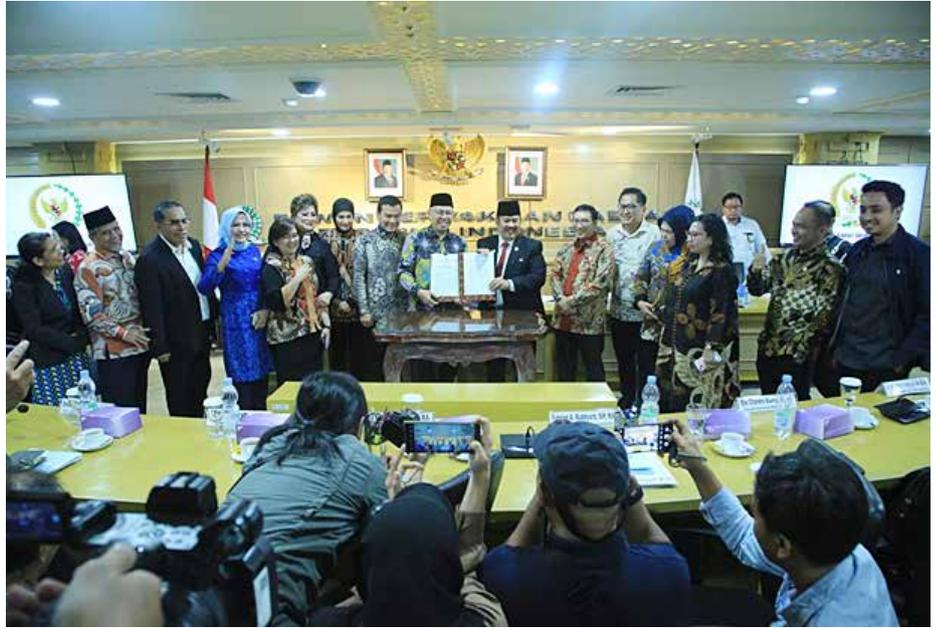
Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah serta keberlanjutan fiskal yang adaptif dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dirancang dalam RPJMN dan RKP benar-benar menyentuh kebutuhan daerah, khususnya dalam mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahmad Nawardi dalam rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Senin (3/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memaparkan strategi pembangunan nasional, termasuk upaya pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan kebi-



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy usai menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

jakan berbasis data, serta dorongan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Ada beberapa masukan anggota Komite IV DPD RI yang disepakati dalam rapat tersebut. *Pertama*, peningkatan indikator kesejahteraan. Kementerian PPN/Bappenas diminta untuk memperbaiki indikator kesejahteraan dan pembangunan guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, pemerintah diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi daerah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan

RPJMN dan RKP, serta memastikan tidak ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2025. *Ketiga*, Komite IV DPD RI menekankan pentingnya peningkatan konektivitas infrastruktur di kawasan barat dan timur Indonesia guna mengurangi kesenjangan pembangunan.

Keempat, program ketahanan pangan melalui Food Estate diharapkan dapat diperluas dan diawasi secara ketat agar berjalan sesuai target. *Kelima*, Komite IV menekankan pentingnya pengawasan yang lebih partisipatif dan transparan terhadap program prioritas untuk menghindari risiko penyimpangan anggaran. (*)

Komite IV Raker dengan Menkeu: Bahas Capaian APBN 2024 dan Kebijakan Fiskal 2025

Nanda Russia Rola

Penulis

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas capaian kinerja APBN 2024 serta proyeksi kebijakan fiskal tahun 2025. Rapat dipimpin Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan dihadiri Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, anggota Komite IV, serta jajaran Kementerian Keuangan.

Dalam rapat, Ahmad Nawardi menyoroti realisasi pendapatan negara 2024 yang mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target, dengan defisit fiskal terkendali di angka 2,29% dari PDB. Namun, pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5% dan tekanan nilai tukar rupiah di level Rp16.000 per USD menjadi tantangan yang perlu diatasi. Sementara itu, Tamsil Linrung menyoroti ketimpangan distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan fiskal 2025 akan difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi



Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersalaman dengan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi se usai kedua belah pihak mengadakan rapat kerja di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

yang inklusif dan berkelanjutan. APBN 2025 dirancang dengan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun, dengan defisit 2,53% dari PDB. Program prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan renovasi sekolah, menjadi perhatian utama dalam sinkronisasi anggaran pusat dan daerah.

Komite IV DPD RI juga menyoroti rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, strategi pembiayaan utang dalam APBN 2025 yang mencapai Rp775,9 triliun harus dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani keuangan negara.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam rapat mencakup peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), serta penyederhanaan syarat penyaluran Dana Desa. Komite IV juga meminta Kementerian Keuangan untuk memastikan pengelolaan PNPB lebih optimal dan adil bagi daerah penghasil.

Komite IV DPD RI dan Kementerian Keuangan sepakat meningkatkan sinergi dalam sosialisasi kebijakan fiskal ke daerah. Sinergi ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan APBN 2025 dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Komite III Soroti Pelayanan dan Kuota Petugas Haji 2025

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Hilman Latief, pada Senin (17/2/2025), membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komite III DPD RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia serta pengawasan terhadap aspek kesehatan jemaah.

Dirjen PHU Kemenag RI Hilman Latief mengungkapkan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun menjadi Rp89,41 juta, atau berkurang sekitar Rp4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini turut berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah menjadi rata-rata Rp55,43 juta. Selain itu, kuota jemaah haji tahun ini ditetapkan sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 haji khusus.

Namun, Komite III DPD



Foto bersama pimpinan dan anggota Komite III DPD RI usai mengadakan rapat kerja dengan Dirjen PHU Kemenag RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

RI menyoroti pengurangan kuota petugas haji yang pada 2025 hanya 2.210 orang, dibandingkan 4.600 petugas pada 2023. Anggota DPD RI dari Maluku Utara, Hasby Yusuf, mempertanyakan kebijakan ini karena sebelumnya pemerintah menyatakan akan menambah jumlah petugas untuk meningkatkan pelayanan.

Anggota DPD RI dari Bengkulu, Destita Khari-lisani, menilai pengurangan jumlah petugas berpotensi menghambat pelayanan. Ia mengusulkan kerja sama dengan travel haji berpengalaman untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas, sehingga pelayanan bagi jemaah tetap optimal.

Selain aspek pelayanan, Komite III DPD RI juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap istitha'ah kesehatan jemaah haji. Dengan adanya kuota 5% bagi jemaah lansia, diperlukan perhatian khusus agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan baik.

Komite III DPD RI menegaskan akan terus mengawal kebijakan penyelenggaraan haji, termasuk memastikan penurunan biaya tidak berdampak pada kualitas layanan. "Kami berharap pemerintah bisa memastikan setiap aspek penyelenggaraan haji 2025 berjalan dengan optimal," kata Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus. (*)

Komite I DPD RI Kunjungi Pemprov Sumbar:

Bahas Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan

M. Fathoni

Penulis

Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu (17/2) guna membahas program reforma agraria serta konflik pertanahan yang terjadi di daerah. Delegasi yang dipimpin oleh Ketua Komite I Dr. Andi Sofyan Hasdam ini disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Komite I DPD RI mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya konflik pertanahan di Sumbar, terutama yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan perkebunan, tambang, serta pengembang properti. "Kami memilih mengunjungi Sumbar dalam kegiatan pengawasan reforma agraria ini karena konflik pertanahan di sini cukup tinggi dan kompleks," ujar Andi Sofyan Hasdam.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa reforma agraria di Sumbar tidak hanya sebatas redistribusi tanah, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia



Ketua Komite I DPD RI menerima cinderamata dari Gubernur Sumbar Mahyeldi usai membahas program reforma agraria serta konflik pertanahan yang terjadi di daerah bersama Gubernur dan jajaran Forkopimda. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

menyoroti pentingnya sertifikasi tanah ulayat agar tidak mudah diperjualbelikan. Selain itu, Pemprov Sumbar saat ini tengah mengupayakan pembentukan dinas khusus pertanahan untuk menangani berbagai persoalan lahan di daerah.

Sejumlah senator yang hadir turut menyoroti berbagai aspek terkait reforma agraria. Senator Jialyka Maharani menekankan pentingnya edukasi administrasi pertanahan guna mencegah praktik mafia tanah, sementara Senator Abraham Liyanto menyatakan perlunya pembaruan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 guna mengantisipasi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks.

Dari sisi perlindungan lahan, Pemprov Sumbar telah memiliki Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial dan Perda No. 4 Tahun 2020 untuk mempertahankan lahan pertanian. Perwakilan Kanwil ATR/BPN juga menegaskan perlunya strategi edukasi masyarakat melalui sosialisasi langsung ke nagari-nagari agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka terkait tanah.

Pertemuan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kanwil ATR/BPN Sumatera Barat, akademisi dari beberapa universitas, lembaga adat, dan tokoh masyarakat. Acara berlangsung selama lebih dari dua jam, mulai pukul 10.00 hingga 12.30 WIB. (*)

Rapat Dengar Pendapat dengan BPDP: Komite IV Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja 2025

Betria Eriani

Penulis

Komite IV DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Senin (17/2/2025). Rapat ini membahas evaluasi kinerja BPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025, dengan fokus pada efektivitas penggunaan dana perkebunan untuk sektor kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, S.Ag., menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan dana perkebunan agar lebih berdampak bagi petani dan industri. Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, melaporkan bahwa pendapatan BPDP tahun 2024 mencapai Rp 28,8 triliun, sebagian besar dari pungutan ekspor kelapa sawit. Namun, sejumlah tantangan dihadapi, seperti penurunan tarif pungutan ekspor, fluktuasi harga CPO, serta realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) yang masih di bawah target.

BPDP menargetkan peremajaan sawit rakyat seluas 120.000 hektar pada 2025 serta perluasan program ke komoditas kakao dan kelapa. Anggota Komite IV DPD RI menyoroti perlunya pening-



Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyerahkan kesimpulan rapat dengar pendapat kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

katan transparansi pendataan, penyederhanaan regulasi PSR, serta optimalisasi komersialisasi hasil riset untuk meningkatkan daya saing industri perkebunan. Selain itu, mereka mengusulkan program beasiswa bagi masyarakat terdampak perkebunan sawit dan pelatihan tenaga kerja sektor perkebunan.

Komite IV juga meminta BPDP memperkuat hilirisasi industri sawit, kakao, dan kelapa untuk meningkatkan nilai tambah produk di pasar global. Selain itu, mereka mendorong kebijakan pencabutan larangan penggunaan pupuk bersubsidi bagi petani sawit guna meningkatkan produktivitas. DPD RI juga menekankan pentingnya ekspansi pasar ke negara berkembang serta penguatan diplomasi perdagangan untuk menyikapi menurunnya per-

mintaan dari negara importir utama.

Selain sektor industri, Komite IV menyoroti pentingnya penanganan dampak lingkungan dan sosial akibat perkebunan sawit. BPDP diminta memasukkan program pengelolaan lingkungan ke dalam rencana kerja 2025 serta meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam verifikasi dan pembaruan data lahan sawit rakyat.

Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara BPDP dan DPD RI dalam implementasi program 2025, memastikan kesejahteraan petani, meningkatkan daya saing industri perkebunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana perkebunan secara transparan dan berkelanjutan. (*)

Komite II DPD RI Awasi Pelaksanaan UU Migas di Aceh

Arso P Nugroho

Penulis

Komite II DPD RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kunjungan kerja (kunker) ini berlangsung di Provinsi Aceh pada Senin (17/2) dengan menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Aceh bersama jajaran Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Senator asal Aceh, Azhari Cage, menyampaikan harapannya agar potensi migas di Aceh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri migas. “Kita harus memperhatikan kesejahteraan pekerja masyarakat lokal dan kearifan setempat,” ujarnya.

Pimpinan Komite II DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, menyoroti cadangan migas Aceh yang signifikan, khususnya di pesisir dan lepas pantai. Ia juga menekankan bahwa Aceh



Komite II DPD RI saat mengadakan kunjungan ke Aceh. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kita harus memperhatikan kesejahteraan pekerja masyarakat lokal dan kearifan setempat.**”

**Anggota Komite II
DPD RI, Azhari Cage**

memiliki hak khusus dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Wakil Gubernur Aceh terpilih, Fadhlullah, mengingatkan agar masyarakat Aceh tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan migas di daerahnya. Senada

dengan itu, Kepala BPMA, Nasri Djalal, menjelaskan bahwa Aceh memperoleh 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) migas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Yanin Kholison, mengungkapkan bahwa eksplorasi migas terus didorong untuk meningkatkan produksi, dengan dominasi temuan gas bumi.

Kegiatan pengawasan UU Migas ini juga diisi dengan kunjungan ke BPMA. Turut hadir dalam kunker tersebut sejumlah pimpinan dan anggota Komite II DPD RI dari berbagai daerah. (*)



BAP DPD RI Terima Aduan Mal-Administrasi, Mafia Tanah, dan Pemberhentian Dosen



Ahmad Syaqui, Wakil Ketua II BAP DPD RI memberikan tanggapan dalam RPDU dengan sejumlah pihak. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) untuk menindaklanjuti tiga pengaduan masyarakat, salah satunya dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terkait dugaan mal-administrasi dalam seleksi anggota Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Perwakilan KTKI, Rahma Fitriati, menyebut bahwa pembubaran KTKI melalui Permenkes No. 12 Tahun 2024 merugikan anggotanya, terutama karena proses

seleksi KKI yang dinilai tidak transparan.

Selain itu, BAP DPD RI juga menerima pengaduan dari Aloysius Dumatubun terkait dugaan mafia tanah dan penerbitan dokumen palsu yang menyebabkan konflik pertanahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Menurut Aloysius, sengketa tersebut terjadi akibat tumpang tindih sertifikat yang melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah serta Kantor Pertanahan Merauke.

Pengaduan lainnya datang dari Agus Siahaya, seorang ASN yang mengaku diberhentikan secara tidak adil setelah membongkar

kasus korupsi di Politeknik Negeri Ambon. Ia meminta DPD RI membantu membatalkan SK pemberhentiannya, karena merasa harusnya mendapatkan penghargaan, bukan sanksi.

Menanggapi aduan tersebut, Anggota BAP DPD RI, Syarif Melvin, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap sengketa tanah yang banyak terjadi di berbagai daerah. Ia menyatakan bahwa BAP DPD RI akan mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang serta mengundangnya untuk mencari solusi.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Papua Selatan, Rudy Tirtayasa, menilai bahwa pengaduan dari KTKI menunjukkan adanya ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa BAP DPD RI akan mengundang Kementerian Kesehatan untuk meminta klarifikasi dan mencari penyelesaian.

BAP DPD RI memastikan akan menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat tersebut dengan mengundang pihak-pihak terkait agar ada solusi yang adil bagi para pengadu. (*)

Komite IV Minta PT SMI Perhatikan Daerah Tertinggal

Betria Eriani

Penulis

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senin (1/2/2025). Rapat tersebut membahas capaian kinerja pembiayaan pembangunan oleh PT SMI tahun 2024 serta rencana program kerja perusahaan pada tahun 2025.

Dalam RDP tersebut, Komite IV DPD RI menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam penyaluran pembiayaan infrastruktur. Salah satunya adalah minimnya kapasitas teknis dan manajerial di pemerintah daerah dalam menyusun proyek yang layak. Selain itu, alokasi pembiayaan dinilai masih lebih banyak terserap di daerah maju. Sementara di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mengalami keterbatasan dalam mengakses pendanaan.

“Kami mengapresiasi langkah PT SMI mendukung proyek-proyek strategis nasional dan daerah, namun kami meminta agar pembiayaan lebih berorientasi pada pemerataan. Kami mendorong PT SMI untuk memperluas jangkauan pembiayaan ke daerah-daerah yang masih tertinggal, termasuk dengan



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansyah, usai menandatangani kesimpulan rapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

memberikan pendampingan bagi pemda dalam menyusun studi kelayakan proyek,” kata Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi.

Komite IV DPD RI juga mendorong PT SMI untuk memperluas cakupan pinjaman ke daerah 3T dengan menyediakan dana pendampingan bagi daerah yang kesulitan memenuhi syarat awal pembiayaan. Selain itu, DPD RI menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis bagi pemerintah daerah melalui program pelatihan dan pendampingan teknis yang lebih intensif.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Komite IV DPD RI meminta PT SMI untuk mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator pembangunan daerah serta menerbitkan laporan berkala terkait alokasi dana dan progres

proyek yang didanai. Selain itu, sinergi dengan BPK RI, BPKP, serta lembaga penegak hukum, juga diharapkan dapat diperkuat guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana pembiayaan.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansyah menyatakan bahwa PT SMI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dengan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel. Dengan strategi yang telah dirancang untuk tahun 2025, PT SMI berharap dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi daerah yang masih tertinggal, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang didanai. (*)

Komite III DPD RI Dorong Jaminan Sosial Lebih Inklusif

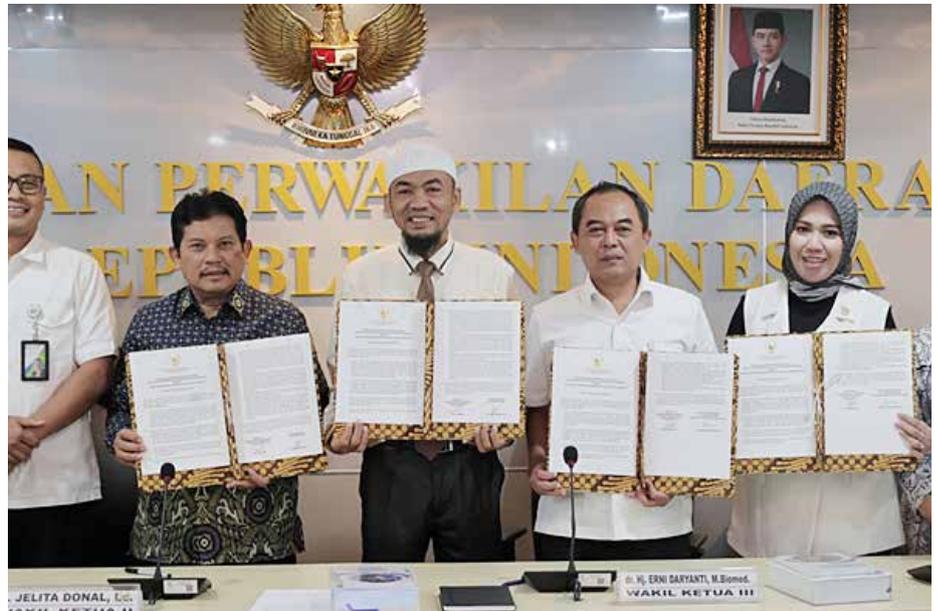
Arso P Nugroho

Penulis

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja (raker) dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan sosial agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan merupakan komitmen Komite III dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya terkait akses jaminan sosial yang lebih baik dan merata,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Jelita Donald dalam raker di DPD RI, Selasa (18/2/2025).

Dalam raker tersebut, isu kesehatan mental juga menjadi perhatian serius dalam rapat ini. Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya ke Bali, ia banyak menerima masukan dari tenaga medis spesialis kejiwaan yang menyampaikan tingginya angka kasus bunuh diri dan gangguan mental. Ia menilai



Pimpinan Komite III DPD RI bersama Dirut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memperlihatkan kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

bahwa layanan kesehatan jiwa harus lebih mendapat perhatian dalam sistem jaminan sosial. “Banyak kasus bunuh diri akibat gangguan jiwa yang membutuhkan perhatian serius. Kami berharap BPJS dapat mengcover layanan kesehatan mental dengan lebih baik,” ucapnya.

Senator dari Maluku Utara Hasby Yusuf pun menyoroti ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ia menekankan bahwa meskipun seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam membayar iuran BPJS, kenyataannya masyarakat di wilayah timur sering mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang berbeda dibandingkan daerah lain.

“Kewajiban warga negara

dalam membayar iuran BPJS sama, baik dari Aceh hingga Papua, tetapi giliran mendapatkan layanan, terjadi ketimpangan. Ini bukan hanya soal BPJS, tetapi juga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial agar keadilan sosial benar-benar terwujud,” tegasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa perubahan UU SJSN diharapkan bukan mengubah haluan penyelenggaraan Program JKN dari nol. Namun, merupakan penyempurnaan dan kelanjutan atas keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai dan diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan program jaminan sosial dan BPJS. (*)

Komite III DPD RI Perjuangkan Hak Masyarakat Adat, Disabilitas, dan Guru Prioritas

Theresia Oktavina

Penulis

Komite III DPD RI menerima audiensi dari tiga kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait perlindungan hak masyarakat adat, pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta nasib guru prioritas swasta yang belum diangkat sebagai ASN, Kamis (27/2/2025). Dalam pertemuan ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LK-PASI) menyuarakan kepastian hukum bagi masyarakat adat, terutama terkait aset ulayat yang sering terabaikan dalam kebijakan pemerintah. Ketua Dewan Pendiri LK-PASI, Juajir Sumardi, mengungkapkan banyak masyarakat adat mengalami penggusuran akibat investasi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, menyatakan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat telah masuk dalam Prolegnas 2025 dan sedang dibahas di Komite I. DPD RI juga akan mengkaji draft perlindungan aset masyarakat adat yang diserahkan LK-PASI.



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI foto bersama dengan sejumlah komponen masyarakat yang beraudiensi ke DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite III DPD RI juga menerima aspirasi dari Komnas Disabilitas yang menyuarakan masih tingginya stigma terhadap penyandang disabilitas dalam pendidikan dan pekerjaan. Ketua Komnas Disabilitas, Dante Rigmalia, mengusulkan pembentukan unit layanan disabilitas di semua jenjang pendidikan. Menurut Anggota Komnas Disabilitas, Jonna Aman Damani, dari lebih 500 kabupaten/kota, baru 254 daerah yang memiliki regulasi perlindungan disabilitas. DPD RI berkomitmen mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melahirkan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) menyampaikan keluhan terkait 2.586 guru prioritas yang belum mendapat formasi ASN, meskipun telah lulus tes PPPK. Ketua FGPS, Rina Dewiastuti, menilai kebijakan yang tidak jelas membuat

para guru terkatung-katung tanpa kepastian. Menanggapi hal ini, Komite III DPD RI telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi konkret agar para guru yang telah lulus seleksi dapat segera diangkat menjadi ASN.

Komite III DPD RI menegaskan bahwa perjuangan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan guru prioritas akan terus dikawal. DPD RI akan mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Dengan berbagai langkah yang dilakukan, DPD RI berkomitmen memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui koordinasi dengan kementerian terkait, pengawal regulasi, serta advokasi langsung agar setiap permasalahan mendapat solusi konkret. (*)

Komite I DPD RI Desak BKN RI :

Selesaikan Pengangkatan Tenaga Non-ASN ke PPPK

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Komite I DPD RI meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI segera menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyoroti masih adanya selisih jumlah tenaga honorer yang belum lulus seleksi dan belum mendapatkan formasi, yang berisiko merugikan para tenaga kontrak di daerah.

“Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer hingga Desember 2024 belum terealisasi dengan baik. Kami mengapresiasi langkah yang telah dilakukan, tetapi masih banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian status,” ujar Andi dalam Rapat Kerja Komite I dengan Kepala BKN RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi menyoroti nasib lebih dari 6.000 guru swasta yang telah lulus prioritas 1 (P1) namun belum masuk database. Ia



Suasana rapat kerja Komite I DPD RI dengan jajaran Badan Kepegawaian Negara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

meminta kejelasan terkait formasi bagi guru swasta yang telah mengikuti seleksi, apakah mereka tetap akan mendapatkan formasi PPPK penuh waktu atau paruh waktu.

Senator dari Kalimantan Utara, Hasan Basri, mempertanyakan informasi terkait pembatalan pengangkatan PPPK tahap 2 serta sistematisasi penggajian bagi PPPK paruh waktu. Sementara itu, Senator asal Sumatera Utara, Penrad Siagian, menyoroti kebijakan yang mewajibkan guru swasta mengajukan surat pengunduran diri dari yayasan sebelum mengikuti seleksi PPPK. Ia menilai aturan ini merugikan jika peserta tidak lolos seleksi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI Zudan

Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa formasi PPPK diusulkan oleh instansi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Ia memastikan sistem seleksi dilakukan dengan pemeringkatan tanpa batasan *passing grade* untuk mengisi formasi yang tersedia.

Zudan juga mengungkapkan bahwa dari 13.348 tenaga P1 yang belum mendapatkan formasi, sebanyak 10.177 telah mendaftar pada 2024 dan 3.171 tidak mendaftar. Dari jumlah tersebut, 7.591 orang telah mendapatkan formasi, sementara 2.586 masih belum memperoleh kepastian. BKN RI menargetkan penyelesaian seluruh tenaga honorer yang berhak diangkat pada tahun ini. (*)

Lalu Niqman Zahir Berikan Tips Petani Jadi Pengusaha

Nanda Russia Rola

Penulis

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir, mengungkapkan bahwa dari total 27.802.434 petani di Indonesia, hanya 6.183.009 orang atau sekitar 21,93 persen yang tergolong sebagai petani milenial. Menurutnya, jumlah ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total populasi petani di Indonesia.

“Jika kita lihat dari 27 juta orang petani, hanya 21,93 persen saja yang masuk kategori petani milenial,” ujar Lalu Niqman Zahir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan lahan pertanian di Indonesia masih didominasi oleh petani gurem, dengan jumlah mencapai 17.261.432 orang. Dengan luas lahan yang sempit, kebanyakan dari mereka hanya mampu bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau menjual kelebihan hasil produksi tanpa strategi bisnis yang jelas.

Menurut Lalu, agar petani dapat berkembang menjadi pengusaha,



Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Jika kita lihat dari 27 juta orang petani, hanya 21,93 persen saja yang masuk kategori petani milenial.**”

**Deputi Bidang
Administrasi
Setjen DPD RI,
Lalu Niqman Zahir**

mereka harus mampu menyusun rencana bisnis, melakukan riset pasar, membentuk usaha kecil dan menengah, serta menjalin kemitraan. Dengan cara ini, petani dapat meningkatkan posisi tawar, efisiensi produksi, serta mempermudah transfer teknologi dan inovasi.

Ia mencontohkan keberhasilan Italia dalam memobilisasi sumber daya pertanian meskipun memiliki modal terbatas dan menghadapi persoalan sosial serta politik yang kompleks. Menurutnya, petani di Italia yang memiliki lahan kecil dapat bertransformasi menjadi pengusaha melalui industri pengolahan berbasis pertanian.

“Di Italia, lahan pertanian dikelola oleh keluarga, kemudian berkembang menjadi industri pengolahan. Pola transformasi inilah yang menjadikan petani bukan sekadar produsen, tetapi juga pengusaha yang mampu bersaing di pasar,” pungkas Lalu Niqman Zahir. (*)



Pendeta Penrad Siagian

Betria Eriani

Penulis

Pendeta Penrad Siagian, lahir pada tahun 1976 di Rantau Prapat, Sumatera Utara, adalah seorang politikus dan pendeta yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024–2029.

Ia menikah dengan Pdt Elvita Sembiring Meliala dan memiliki latar belakang akademis yang kuat, dengan pendidikan dari STT Abdi Sabda Medan dan studi lanjutan di

Universitas Kristen Duta Wacana serta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebelum terjun ke politik, Penrad Siagian aktif dalam berbagai kegiatan organisasi keagamaan dan dialog antariman. Ia pernah bertugas di Biro Dialog antar Iman Sinode GBKP dan menjadi bagian dari Steering Committee Hubungan Islam Kristen Konsorsium Indonesia-Belanda. Selain itu, ia juga terlibat di Pusat Study Agama-agama di UKDW Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai Sekretaris eksekutif PGI.

Dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, Penrad Siagian berhasil memenangkan kursi

di DPD dengan perolehan suara yang signifikan, mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Sumatera Utara. Keterlibatannya di politik diharapkan membawa perubahan dan representasi yang efektif untuk masyarakat di daerah pemilihannya.

Penrad Siagian juga dikenal sebagai pendiri dan Direktur Paritas Institut, sebuah lembaga yang fokus pada dialog dan kerja sama antar kepercayaan. Kepemimpinannya diharapkan dapat memperkuat kerukunan dan kolaborasi antar kelompok agama di Indonesia, terutama dalam konteks keberagaman yang kaya.

Sebagai anggota DPD, Penrad Siagian memiliki visi untuk memajukan Sumatera Utara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang inklusif dan berbasis dialog antar sektoral. Komitmen dan latar belakangnya diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional, mendukung agenda pembangunan yang lebih luas untuk Indonesia. (*/berbagai sumber)



Lia Istifhama

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Lia Istifhama, yang lebih dikenal sebagai Ning Lia, adalah anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur. Lahir pada 13 Februari 1984, Lia adalah anak pertama dari pasangan tokoh NU KH. Masykur Hasyim dan Hj. Aisyah yang merupakan kakak tertua dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dikenal luas sebagai aktivis sosial, advokat, penulis, musisi, dan akademisi, Lia memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia sosial dan agama.

Pendidikan Lia mencerminkan semangat belajarnya yang luar biasa. Pada 2007, ia meraih gelar sarjana dari tiga kampus berbeda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Fakultas Muamalah IAIN Sunan Ampel, dan Fakultas Dakwah STID Taruna Surabaya. Lia kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, meraih gelar Magister Ekonomi Islam pada 2013 dan gelar Doktor pada 2020.

Selain dunia pendidikan, Lia aktif dalam berbagai organisasi sosial. Ia terlibat dalam IPPNU

Kota Surabaya, dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur serta Ketua DPD Perempuan Tani HKTJ Jawa Timur. Keterlibatannya dalam organisasi ini menegaskan kepeduliannya terhadap pemberdayaan perempuan dan petani di Jawa Timur.

Lia juga memiliki prestasi di dunia seni, menulis dan meluncurkan tiga lagu yang terinspirasi dari kehidupan petani, yaitu Cinta Tani, Syair Tani, dan Petani Bejo pada 2022. Sebagai penulis, Lia telah menerbitkan berbagai karya yang mencakup topik sosial, hukum, dan pendidikan, se-

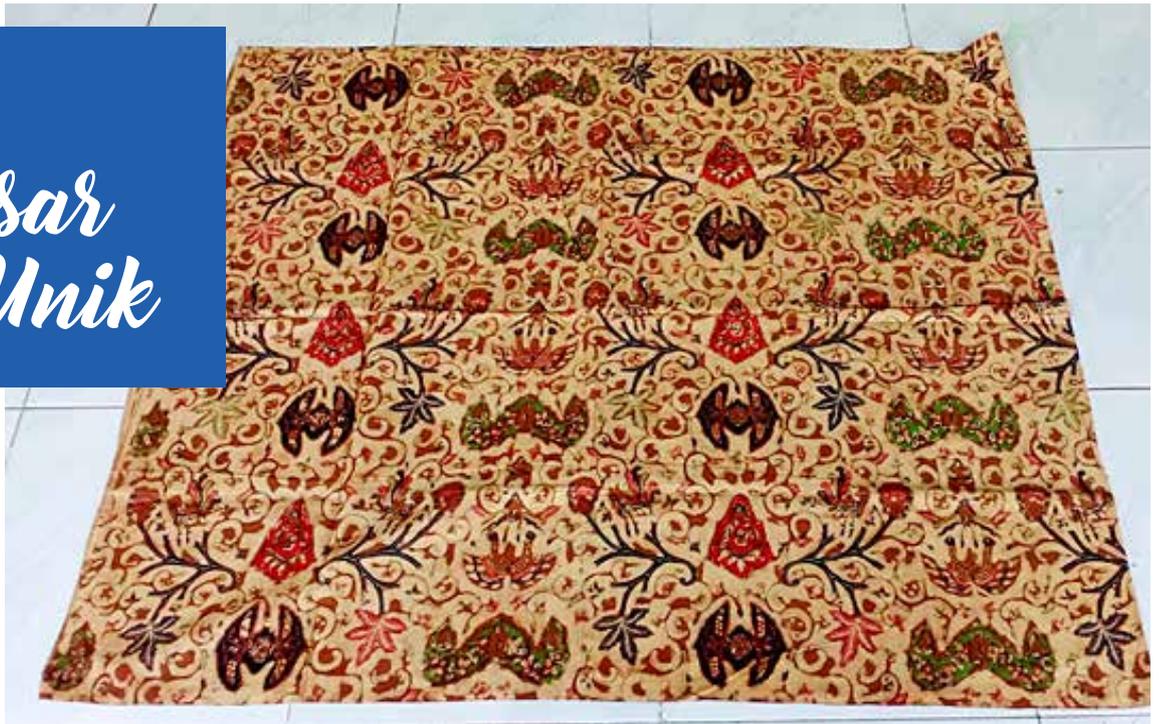
perti Before After Tsunami Aceh: Trilogi dan Tragedi dan Resiliensi Korban Pelecehan Seksual.

Atas dedikasinya di berbagai bidang, Lia Istifhama menerima berbagai penghargaan, termasuk menjadi salah satu Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jawa Timur 2020 dan Penggerak Perempuan Bidang Pertanian dari DP3AK Jatim. Lia terus berkontribusi pada masyarakat dengan semangat dan dedikasinya, memotivasi banyak orang untuk peduli dan berperan aktif dalam perubahan sosial. (*/berbagai sumber)





Batik Makassar yang Unik



Batik Makassar (Foto Pabrik Batik Solo)

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Batik Makassar adalah warisan budaya yang kaya akan makna dan simbolisme, dengan ciri khas yang membedakannya dari batik daerah lain di Indonesia. Batik ini menggunakan motif yang terinspirasi dari alam, seperti bunga, daun, dan simbol kehidupan laut yang menggambarkan kedekatan masyarakat Makassar dengan laut. Sejarah batik Makassar bermula pada abad ke-14, ketika pengaruh budaya Tiongkok dan India mulai masuk melalui jalur perdagangan, dan pada masa itu batik digunakan oleh kalangan kerajaan sebagai simbol status sosial.

Proses pembuatan batik Makassar membutuhkan keterampilan tinggi, mulai dari menyiapkan kain hingga teknik pewarnaan tradisional. Warna-warna khas seperti merah, cokelat, kuning,

dan biru mencerminkan kekayaan alam Makassar, dan setiap motif memiliki makna yang mendalam, mencerminkan kehidupan sosial dan filosofi masyarakat setempat. Pewarnaan alami yang menggunakan bahan-bahan lokal seperti kulit kayu memberikan kesan ramah lingkungan dan mempertahankan warisan budaya.

Batik Makassar digunakan dalam acara adat, pernikahan, dan acara resmi lainnya sebagai simbol kehormatan dan prestise. Meskipun dipengaruhi oleh pola Barat pada masa kolonial, batik ini tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional yang relevan dan dihargai hingga kini. Batik ini juga menjadi identitas budaya yang membanggakan masyarakat Makassar.

Selain itu, batik Makassar sering dilengkapi dengan bordir tangan yang menam-

bah keindahan dan kekhasan desainnya. Bordir ini menunjukkan keterampilan luar biasa pengrajin lokal dalam menciptakan karya seni yang bernilai tinggi, memperkuat daya tarik dan keunikan batik tersebut. Bordir menjadi bagian integral dari batik Makassar, menambah dimensi artistik pada setiap kain.

Batik Makassar kini mulai dikenal luas, melampaui batas wilayah Makassar dan bahkan merambah pasar internasional. Keterlibatan generasi muda dalam pengembangan batik, menggabungkan elemen tradisional dan modern, menunjukkan bahwa batik Makassar tidak hanya bertahan sebagai seni kaya sejarah, tetapi juga berkembang sesuai zaman. Batik ini tetap menjadi kebanggaan masyarakat Makassar dan warisan budaya yang penting dalam khasanah budaya Indonesia. (*)

The Unique Makassar Batik



Fandi Tri Prayogo

Written by

Makassar batik is a cultural heritage that is rich in meaning and symbols, with distinctive characteristics that distinguish it from other batik in Indonesia. This batik uses motifs inspired by nature, such as flowers, leaves, and symbols of marine life that illustrate the closeness of Makassar people to the sea. Back in the 14th century, the history of Makassar batik began when the Chinese and Indian cultural influences entering through trade routes, and at that time batik was used by the Royal Class as a symbol of social status.

The process of making Makassar batik requires high skills, starting from preparing the cloth to traditional dyeing techniques. Distinctive colors

such as red, brown, yellow, and blue reflect the natural wealth of Makassar, and each motif carries deep meaning, reflecting the social life and philosophy of the local community. The natural dyeing process, using local materials such as tree bark, gives an environmentally friendly impression while preserving cultural heritage.

Makassar Batik is used in traditional events, weddings, and other formal events as a symbol of honor and prestige. Although influenced by Western patterns during the colonial era, Makassar Batik still maintains traditional elements that are relevant and appreciated to this day. It is also a cultural identity that boasts the people of Makassar.

In addition, Makassar batik is often complemented with hand embroidery that enhances the beauty and uniqueness

Batik Makassar (Foto Suara Muhammadiyah)

of its design. This embroidery demonstrates the extraordinary skills of local artisans in creating valuable works of art, further strengthening the appeal and uniqueness of the batik. Embroidery is an integral part of Makassar batik, adding an artistic dimension to every piece of fabric.

Nowadays, Makassar Batik has gained wider recognition, going beyond the borders of Makassar and even reaching the international market. The involvement of younger generation in developing the batik by combining traditional and modern elements, shows that Makassar batik not only survives as a historically rich art, but also develops with the times. It remains a source of pride for the people of Makassar and an important cultural heritage within Indonesia's cultural legacy. (*)



Masjid Muhammad Cheng Ho, Samarinda



Masjid Muhammad Cheng Ho, Samarinda (Foto Syafruddin AL)

Lela Sa'diah

Penulis

Masjid Laksamana Cheng Ho, terletak di luar kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan salah satu destinasi religi yang sangat menarik. Masjid ini dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang tokoh sejarah Tionghoa, yaitu Cheng Ho, seorang laksamana Muslim yang terkenal pada abad ke-15. Kehadiran masjid ini membawa nuansa keberagaman budaya, menggabungkan unsur-unsur arsitektur Tionghoa dan Islam, sehingga menciptakan suasana yang sangat khas dan berbeda dibandingkan masjid pada umumnya.

Masjid Cheng Ho memiliki desain yang memadukan elemen-elemen tradisional Tionghoa dengan ciri khas arsitektur Islam. Atap masjid ini terlihat seperti pagoda yang menjadi simbol budaya

Tionghoa, sementara di bagian dalam, ornamen-ornamen Islam seperti kaligrafi Arab dan mihrab yang elegan tetap mendominasi. Bangunan ini juga dikelilingi oleh taman yang asri, menambah kesan damai bagi setiap pengunjung yang datang.

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Cheng Ho juga menjadi destinasi wisata religi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan arsitektur dan atmosfer tenang di sekitar masjid menjadikannya tempat yang tepat untuk meditasi dan refleksi diri. Pengunjung sering kali datang untuk menikmati keindahan bangunan dan juga untuk merasakan kedamaian yang ditawarkan oleh lingkungan masjid yang asri dan sejuk.

Masjid ini juga dikenal sebagai simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Ke-

hadiran Masjid Cheng Ho menunjukkan bahwa Islam dan budaya Tionghoa bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Melalui masjid ini, banyak pesan tentang keberagaman dan perdamaian yang bisa dipetik, yang semakin memperkuat ikatan antara berbagai kelompok masyarakat di daerah tersebut.

Setiap tahun, Masjid Cheng Ho juga menggelar berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan perayaan hari-hari besar Islam, yang sering kali diikuti oleh umat Muslim dari berbagai daerah. Tidak jarang, masjid ini juga mengundang tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan ceramah yang menginspirasi, menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan keagamaan yang tidak hanya melayani aspek ibadah, tetapi juga pendidikan agama.

Bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Timur, Masjid Cheng Ho bisa menjadi salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan. Keindahan arsitektur yang menggabungkan dua budaya yang berbeda, serta nuansa religius yang kental, menjadikannya sebagai simbol perdamaian dan toleransi. Kunjungan ke masjid ini akan memberi pengalaman yang mendalam tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia. (*)

Muhammad Cheng Ho Mosque, Samarinda

Lela Sa'diah

Written by

Muhammad Cheng Ho Mosque, located outside Samarinda city, East Kalimantan, is one of the most enchanting religious destinations. This mosque was built as a form of respect for a historical figure of Chinese descent, Cheng Ho, a famous Muslim admiral in the 15th century. The presence of this mosque brings a nuance of cultural diversity, combining Chinese and Islamic architectural elements, thus creating a very distinctive and unique atmosphere compared to other mosques.

Cheng Ho Mosque has a design that combines traditional Chinese elements with typical Islamic architectural features. The roof of the mosque resembles a pagoda, a symbol of Chinese culture, while inside, the interior is dominated by Islamic ornaments such as Arabic calligraphy and an elegant mihrab. The building is also surrounded by a beautiful garden, adding to the serene ambiance for every visitor.

In addition to being a place of worship, Cheng Ho Mosque is also an attractive religious tourism destination for both local and foreign tourists. The beautiful architecture and the serene atmosphere around the mosque make it an ideal place for meditation and self-reflection. Visitors often come to enjoy the beauty of the building and also to feel the tranquility offered by the peaceful and lush environment of the mosque.

This mosque is also known as a symbol of tolerance between religious communities in Indonesia, especially in East Kalimantan. The presence of Cheng Ho Mosque shows that Islam and Chinese culture can live side by side in harmony. Through this mosque, many messages about diversity and peace can be learned, which further strengthens the bonds



Mihrab masjid Muhammad Cheng Ho, Samarinda dan ornamennya. (Foto Syafruddin AL)

between different communities in the region.

Every year, the Cheng Ho Mosque also holds various religious activities, such as recitations and celebrations of Islamic holidays, which are often attended by Muslims from various regions. The mosque also frequently invites religious and community leaders to give inspiring khutbah, making the mosque a center for religious activities that not only serve aspects of worship, but also religious education.

For those visiting East Kalimantan, Cheng Ho Mosque is a must-visit destination. The beautiful architecture that combines two different cultures with a strong religious nuance, makes it a symbol of peace and tolerance. A visit to this mosque will provide a profound experience of highly appreciating the diversity of culture and religion in Indonesia. (*)



Bongko Kopyor yang Paling Dicari di Surabaya



Bongko Kopyor Surabaya (Foto: Sugeng Rawuh Pamiarso)

Lela Sa'diah

Penulis

Bongko Kopyor adalah salah satu kuliner khas Surabaya yang sangat digemari oleh masyarakat setempat, terutama sebagai hidangan penutup atau takjil saat berbuka puasa di bulan Ramadhan. Makanan ini terbuat dari kelapa muda yang diparut kasar, dicampur dengan berbagai bahan seperti ketan, santan kental, gula merah, dan sedikit garam. Rasanya yang manis, gurih, dan kenyal membuat bongko kopyor menjadi sajian yang menyegarkan dan memuaskan. Terkadang, bongko kopyor juga ditambahkan dengan bahan pelengkap seperti kacang tanah, sehingga memberikan tekstur tambahan yang membuatnya semakin lezat.

Sejarah bongko kopyor di Surabaya memiliki akar yang

cukup dalam budaya kuliner Jawa Timur. Makanan ini sudah dikenal sejak zaman kolonial dan merupakan perpaduan dari berbagai pengaruh budaya, baik dari Tionghoa maupun Jawa. Pada awalnya, bongko kopyor dibuat oleh masyarakat lokal dengan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka, seperti kelapa muda yang melimpah di daerah tropis. Kelapa muda sendiri merupakan bahan yang mudah ditemukan dan sering digunakan dalam berbagai hidangan tradisional, termasuk bongko kopyor.

Pada masa kolonial, bongko kopyor dikenal oleh masyarakat Surabaya sebagai hidangan yang disajikan dalam acara-acara spesial, seperti perayaan Lebaran atau pertemuan keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, bongko kopyor mulai berkembang menjadi makanan

yang bisa dinikmati setiap hari. Banyak pedagang kaki lima yang menjual bongko kopyor di berbagai sudut kota, terutama di kawasan yang ramai seperti pasar atau tempat-tempat wisata. Masyarakat Surabaya pun semakin mengenal bongko kopyor sebagai hidangan yang nikmat dan menyegarkan.

Dalam perkembangannya, bongko kopyor menjadi salah satu takjil yang paling dicari saat bulan Ramadhan. Keberadaannya yang mudah ditemukan di pasar atau warung-warung sekitar Surabaya menjadikannya pilihan utama bagi banyak orang yang ingin berbuka puasa dengan sesuatu yang manis dan menyegarkan. Selain itu, kehadiran bongko kopyor juga menambah warna dalam tradisi kuliner Surabaya yang kaya akan keanekaragaman rasa dan bahan. Banyak orang yang menyukai tekstur kelapa muda yang lembut dan kenyal, berpadu dengan rasa manis dari gula merah dan gurihnya santan.

Di Surabaya, bongko kopyor juga sering dijadikan sajian untuk menjamu tamu atau sebagai oleh-oleh khas kota. Banyak toko-toko oleh-oleh yang menjual bongko kopyor dalam kemasan siap saji, sehingga orang-orang yang datang dari luar kota dapat membawa pulang makanan ini sebagai kenang-kenangan. Bongko kopyor telah menjadi bagian dari identitas kuliner Surabaya yang tak hanya sekadar makanan, tetapi juga menjadi simbol keramahan dan kekayaan budaya lokal. (*)

Bongko Kopyor, Most Sought- After Dish in Surabaya



Surabaya Bongko Kopyor (Detikco Photto)

Lela Sa'diah

Written by

Bongko Kopyor is one of Surabaya's culinary specialties that is highly favored by the locals, especially as a dessert or iftar dish in the month of Ramadan. This food is made from grated young coconut, mixed with various ingredients such as sticky rice, thick coconut milk, brown sugar, and a little salt. Its sweet, savory, and chewy taste makes bongko kopyor a refreshing and satisfying dish. Sometimes, bongko kopyor is also added with complementary ingredients such as peanuts, adding extra texture that makes it even more delicious.

The history of bongko kopyor in Surabaya is deep-rooted from East Javanese culinary culture. This dish has been known since colonial times and is a blend of various

cultural influences, both from Chinese and Javanese traditions. Initially, bongko kopyor was made by local people with simple ingredients that were around them, such as young coconuts that are abundant in tropical areas. Young coconut is an ingredient that is easy to find and is often used in various traditional dishes, including bongko kopyor.

During the colonial era, bongko kopyor was known by the locals as a dish served at special events, such as Eid celebrations or family gatherings. However, over time, bongko kopyor began to develop into a dish that could be enjoyed daily. Many street vendors sell bongko kopyor in various corners of the city, especially in crowded areas such as markets or tourist spots. The people of Surabaya are increasingly familiar with bongko kopyor as a delicious and refreshing dish.

In its development, bongko kopyor has become one of the most sought-after iftar dishes during the month of Ramadan. Its easy availability in markets or small shops around Surabaya makes it the main choice for many people who want to break their fast with something sweet and refreshing. In addition, the presence of bongko kopyor also adds colour to Surabaya's culinary tradition, which is rich in a variety of flavours and ingredients. Many people enjoy the soft and chewy texture of young coconut, combined with the sweet taste of brown sugar and the savoury taste of coconut milk.

In Surabaya, bongko kopyor is also often served as a dish to entertain guests or as a typical souvenir from the city. Many souvenir shops sell bongko kopyor in ready-to-eat packages, allowing visitors from outside the city to bring this dish home as a keepsake. Bongko kopyor has become part of Surabaya's culinary identity, not just as food, but also as a symbol of local hospitality and cultural richness. (*)



Momentum atau Beban? Menanti Kiprah 961 Kepala Daerah Baru

Oleh:
Nunung Ariyani, SE., MM.
(Analisis Legislatif Ahli Muda)

Di balik meriahnya pelantikan 961 kepala daerah, harapan besar dan tantangan kompleks menanti. Apakah 961 kepala daerah baru ini sanggup menjawab harapan masyarakat dan membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing? Pelantikan ini mencatat rekor sebagai pelantikan dengan peserta terbanyak sepan-

jang sejarah pilkada langsung di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, acara ini menjadi simbol penguatan persatuan antara pemerintah pusat dan daerah. Momen ini menjadi yang pertama kalinya di Indonesia melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Totalnya, 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik secara serentak di Istana Merdeka.

Namun, di balik kemeriahan ini, tersimpan pertanyaan besar: Mampukah momentum ini menjadi landasan kemajuan daerah, ataukah justru menjadi tantangan baru bagi para pemimpin terpilih? Masyarakat menaruh harapan

besar kepada pemimpin baru untuk membawa perubahan positif. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Kompleksitas permasalahan di 481 daerah menuntut analisis mendalam dan solusi tepat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Momentum ini harus menjadi awal dari perubahan nyata, bukan hanya seremonial tanpa makna.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai representasi daerah memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan di tingkat daerah. DPD RI harus memastikan bahwa aspirasi daerah tersampaikan dan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, DPD RI juga harus menjadi mitra kritis bagi kepala daerah dalam menjalankan amanah rakyat. Jangan sampai ada kepala daerah yang menyalahgunakan kekuasaan





untuk kepentingan pribadi atau kelompok. DPD RI harus menjadi jem-

batan antara pemerintah pusat dan daerah.

Semangat pelantikan kepala daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan perubahan positif

di daerah. Euforia ini harus menjadi motivasi untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kepala daerah yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus mampu menjawab tantangan dan memenuhi harapan masyarakat. DPD RI sebagai representasi daerah akan terus mengawasi dan memastikan bahwa amanah ini dijalankan dengan baik. Semoga, momentum ini menjadi awal dari era baru pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. (*)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Selamat Ramadhan

1446 H

31 Maret - 1 April 2025



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

